

SINERGI

 **BPIW virtual**
EXPO 2020 

**Gelar *Virtual Expo*,
BPIW Tampilkan Perannya
sebagai Perencana dan Penyusun
Program Pembangunan
Infrastruktur Sektor PUPR**

**Kaleidoskop
2020**





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@pu.go.id Telp. +6221-2751-5802

Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat

Pembaca yang terhormat, Kegiatan BPIW Virtual Expo yang digelar November lalu akan menjadi Topik Utama edisi Edisi 49 November-Desember 2020. Dalam Topik Utama ini dibahas mengenai tiga *Talk Series* yang digelar dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga dihadirkan Warta BPIW yang mengupas mengenai Inovasi *millennial* dalam membangun negeri.

Berbeda dari edisi sebelumnya, penghujung 2020 ini menampilkan tiga orang wanita yang berkontribusi pada pelaksanaan BPIW Virtual Expo. Mereka adalah Alis Listalatu, S.T., M.Sc, Tiara Titi Kartika, S.I.Kom, MA, dan Rikawati, ST, MT. Pengalaman mereka dalam menjalankan tugasnya masing-masing pada perhelatan akbar tersebut, ditampilkan pada rubrik Wawancara.

Rubrik-rubrik reguler tetap mewarnai buletin edisi seperti Kilas Peristiwa, Pelesiran, Bidik Lensa, Info Pengembangan wilayah, Review, dan Sorot. Selain itu tetap dihadirkan Surat Pembaca yang berisi saran maupun kritikan membangun dari pembaca Buletin Sinergi.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW



28

Wawancara:

Kiprah “Tiga Srikandi BPIW”
Dibalik Kesuksesan Penyelenggaraan BPIW
Virtual Expo

Perspektif

Sri Indah Wibi Nastiti, S.Si, M.Si.

Pemerintah Daerah Perlu Selalu Dilibatkan
pada Proses Pembangunan infratraktur

20

Warta BPIW:

Saat Milenial Dicap Boros, Generasi Muda BPIW
Gelar Webinar Bijak Finansial

46

Review:

Dimensi Urbanisasi dan Desentralisasi
dalam Pengembangan Wilayah

49

Serba-serbi:

Logo BPIW

52



50

Zhein Adhi Mahendra Setiawan S.E, M.Sc.
Pelajaran Berharga Menuntut Ilmu di Jepang,
Dimarahi Hingga Dapat Dua Penghargaan

Tim Penyusun

Pengarah:
Hadi Sucahyono

Penanggung Jawab:
Iwan Nurwanto

Penasihat

Benny Hermawan
Tris Raditian
Kuswardono
Manggas Rudy Siahaan

Pemimpin Redaksi
Hari Suharto Diyaksa

Redaktur Pelaksana

Tiara Titi Kartika

Staf Editor :
Alis Listalatu
Hendra Djamal
Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:

Daris Anugrah
Indira Dwi Kusumatuti
Tim Kontributor Pemberitaan

Sekretariat:

Untung Priyono
Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR

Edisi 49 | November - Desember 2020

daftar isi



55
Kaleidoskop
2020

4

Topik Utama:
**Gelar *Virtual Expo*,
BPIW Tampilkan Perannya
sebagai Perencana dan Penyusun
Program Pembangunan
Infrastruktur Sektor PUPR**

Design Grafis :
Heri Hito
Infografis, layout :
Ajeng Ayuning Pertiwi
Cover line art:
Cut Myra Sukmawati

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpiw@gmail.com,
humasbpiw@pu.go.id
Website: bpiw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751-5802

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@pu.go.id

Gelar *Virtual Expo*, BPIW Tampilkan Perannya sebagai Perencana dan Penyusun Program Pembangunan Infrastruktur Sektor PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah banyak menghasilkan produk terkait perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Peran nyata tersebut ditampilkan dalam wujud BPIW Virtual Expo 2020. Tidak hanya expose produk, kegiatan itu memberikan sumbangsih BPIW terhadap pengembangan wilayah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



BPIW Kementerian PUPR menggelar BPIW *Virtual Expo* 2020 mulai 16 sampai dengan 20 November 2020. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Expo 2020 tersebut di Auditorium Kementerian PUPR, Senin, 16 November 2020. Saat pembukaan tersebut, Anita menyatakan produk perencanaan dan pemrograman yang dihasilkan BPIW sebagai bagian dari masukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensi infrastruktur lainnya seperti jalan jembatan, pembangunan sarana dan prasana dasar, dan perumahan.

Salah satu produk yang dihasilkan BPIW menurutnya adalah Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024. Didalam produk yang sudah dibukukan itu didalamnya terdapat produk-produk perencanaan, seperti pengembangan metropolitan dengan perencanaan terpadu infrastruktur dan pengembangan wilayah.

“Dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19, Kementerian PUPR melaksanakan program Padat Karya Tunai, agar masyarakat mendapat pendapatan,” ujarnya. Dikatakannya juga, dalam menghadapi era Indonesia 4.0 sekaligus adaptasi Pandemi Covid-19, BPIW Kementerian PUPR telah menerapkan digitalisasi dalam proses perencanaan dan pemrograman guna mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dan perkotaan. “Salah satunya, BPIW telah melaksanakan *Video Conference* untuk kegiatan Konsultasi Regional 2020,” terangnya.

Ia juga menilai BPIW *Virtual Expo* 2020 sebagai bentuk adaptasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital. “Saya berharap acara ini dapat menjadi wadah diskusi serta kerja



PLT Sekjen Kementerian PUPR Prof Anita Firmanti dan Kepala BPIW Hadi Sucahyono melakukan prosesi pembukaan BPIW *Virtual Expo*.

sama antarpihak untuk peningkatan kinerja dalam perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah, utamanya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, pameran ini diselenggarakan sebagai sarana mempublikasikan hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh BPIW. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Adapun tema kegiatan ini adalah “*Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Pengembangan Wilayah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional*”.

Hadi menjelaskan, tema tersebut dipilih sejalan dengan upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19. Ia menyatakan pameran dilaksanakan secara virtual karena saat ini belum memungkinkan mengadakan pameran secara *offline* dan juga sebagai inovasi di masa pandemi Covid-19.

Dikatakannya, dalam kaitannya dengan PEN sebagai akibat dari

Produk perencanaan dan pemrograman yang dihasilkan BPIW sebagai bagian dari masukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensi infrastruktur lainnya seperti jalan jembatan, pembangunan sarana dan prasana dasar, dan perumahan.



Kepala BPIW Hadi Sucahyono saat memberikan pidato pembukaan BPIW Virtual Expo

Hasil-hasil kajian BPIW dimuat dalam 66 panel informasi visual dan sejumlah video. Ada enam tema tematik yang ditampilkan

wabah Covid-19 BPIW memberi masukan terhadap pelaksanaan program padat karya, sebagai bagian dukungan PEN. Masukan tersebut dalam hal daerah mana yang diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat program itu. Untuk menentukan daerah mana saja, dilihat dari sisi jumlah PHK yang paling tinggi dan daerah yang dianggap paling banyak terkena wabah. "Kita yang memberi masukan, Ditjen yang melaksanakan," ungkapnya.

Expo ini dilakukan dengan menayangkan panel-panel dan video hasil kajian BPIW melalui *website* digitalexpo.pu.go.id. Selain itu juga diselenggarakan *Talk Series* secara *online* melalui Zoom dan Youtube *Live Streaming*.

Hasil-hasil kajian BPIW dimuat dalam 66 panel informasi visual dan sejumlah video. Ada enam tema substansi yang ditampilkan yakni tema Kawasan Perkotaan; Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dan Pulau-pulau Kecil 3T; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri dan

Lumbung Pangan; Pembangunan Berkelanjutan dan *New Urban Agenda*; serta tema Kebijakan, Strategi, dan Dukungan Sistem.

Selain itu, ada *Talk Series* yang digelar tiga kali. *Talk Series* Pertama dengan tema "*Pemulihan Ekonomi Nasional di Kawasan Perkotaan, Kawasan Industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus*" digelar pada 16 November 2020 pukul 10.00 – 12.30 WIB. *Talk Series* kedua bertema "*Dukungan Infrastruktur PUPR di Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dan Pulau-Pulau Kecil 3T*" akan digelar pada 18 November pukul 10.00 – 12.00 WIB.

Hari terakhir expo tanggal 20 November diawali dengan penampilan dari Yura Yunita secara virtual, disusul *Talk Series* ketiga bertema "*Millennials Talk: Inovasi Millennial dalam Membangun Negeri*" yang melibatkan generasi muda PUPR, dan diakhiri dengan penutupan expo. Berikut rangkuman dari kegiatan tiga *Talk Series* tersebut :

Talk Series 1

Pemulihan Ekonomi Nasional di Kawasan Perkotaan, Kawasan Industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus

Daerah perkotaan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi menjadi episentrum penyebaran Covid 19. Perkotaan juga terdampak cukup



Pelaksanaan Talk Series 1 dalam rangkaian BPIW Virtual Expo

besar dengan ancaman peningkatan kemiskinan, angka pengangguran serta penurunan pendapatan ekonomi.

Hal itu dipaparkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam *Talk Series I BPIW Virtual Expo 2020* di Jakarta, Senin 16 November 2020. Pada acara ini hadir pula narasumber lain, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, Direktur PT. Kawasan Industri Kendal, Didik Purbadi, serta Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Taufiq Budi Santoso.

Hadi mengungkapkan, saat ini Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di 10 kawasan metropolitan. Hal tersebut sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi setelah terdampak Covid 19. "Selain itu juga untuk mengurangi kesenjangan dan disparitas wilayah," terang Hadi.

Ia juga menekankan, upaya mengatasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian juga

dilakukan dengan dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). "Pengembangan ini dilakukan, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja yang banyak," jelasnya.

Di samping itu, BPIW juga terus mendorong terwujudnya kawasan metropolitan cerdas di tanah air. "Untuk mewujudkannya, memang perlu ada kolaborasi dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, termasuk BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastrukturnya," papar Hadi.

Sementara itu, Wahyu Utomo mengatakan, saat ini Pemerintah tengah mendorong pembangunan kawasan ekonomi khusus di tanah air. Menurutnya, Kebijakan tersebut untuk memberikan dampak berganda, baik saat konstruksi serta setelah beroperasi.

"Secara jangka pendek dampak positif pembangunan KEK berupa pembangunan infrastruktur pendukung di lokasi sekitarnya. Kemudian, akan ada penyerapan investasi dari pembangunan KI yang merupakan proyek strategis nasional," ujarnya. Di tempat sama, Abdul Kamarzuki mengatakan,

Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di 10 kawasan metropolitan. Hal tersebut sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi setelah terdampak Covid 19.

Kementerian PUPR mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

saat ini pengembangan KEK akan semakin mudah khususnya dalam pengadaan tanah. “Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjamin pengembangan kawasan ekonomi mendapatkan kemudahan dalam hal pengadaan tanahnya,” terangnya.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN juga memberi kemudahan perizinan untuk pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Ke depan kami akan mendorong proses RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, -red) yang lebih cepat, untuk kemudian disahkan menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” jelasnya.

Di sisi lain, Didik Purbadi mengakui, saat ini Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan yang menarik bagi investasi, baik dari investor luar maupun dari dalam negeri. Hal tersebut tak lain karena peningkatan infrastruktur yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. “Salah satunya di sekitar KI Kendal,” terangnya.

Kemudian, Taufiq Budi Santoso mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyambut baik Kementerian PUPR melakukan pemulihan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan kawasan perkotaan metropolitan.

Ia mengakui, saat ini Pemprov Jabar tengah melakukan terobosan dalam melakukan pengembangan wilayah. “Selain terus mengembangkan Metropolitan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat), juga mengembangkan Metropolitan Rebana. Metropolitan Rebana berada di wilayah utara atau timur laut Jabar yang melingkupi tujuh kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia mengatakan, Rebana Metropolitan yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan serta Kota Cirebon itu diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan.

“Setiap KI yang berada di dalamnya, rencananya akan dikembangkan dengan prinsip terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan,” ungkap Taufiq.

Talk Series 2

Dukungan Kawasan Infrastruktur PUPR di Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

Kementerian PUPR mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Terdapat cara mengintegrasikan Program-program prioritas, seperti Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kota Kecil, Kawasan Transmigrasi, KSPN dan Rawan Air dan Sanitasi.

Dukungan sektor PUPR menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan seperti pembangunan jembatan dan jalan lingkungan.

Selain itu pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan pengolahan komoditi unggulan perdesaan seperti tambak, rantai jemur, dan bangunan penggilingan padi.



Talk Series 2 melalui video conference pada BPIW Virtual Expo

“Dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mempertahankan nilai budaya dan berorientasi pada peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), di kawasan perdesaan,” ujar Hadi saat *Talk Series* melalui *video conference* (vicon) dengan tema Dukungan Infrastruktur PUPR di Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terkecil, Terluar, dan Terdepan (3T), Rabu, 18 November 2020.

Dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan PPKT sarannya adalah Peningkatan Ekonomi Kawasan seperti program *Packing House*, Sarana Pengolahan Hasil, *Cold Storage*, dan Pergudangan. Sasaran lainnya yakni Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kawasan seperti Air Minum, Pengolahan Sanitasi, Limbah, dan Persampahan.

“Untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan tersebut membutuhkan keterpaduan

implementasi program yang bersifat lintas Kementerian / Lembaga (K / L) seperti Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pariwisata, Perindustrian, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” ujar Hadi.

Keterpaduan implementasi program tersebut menurut Hadi juga kewenangan lintas kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak hanya, keterpaduan tersebut juga area program-program yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dengan demikian menurut Hadi diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar K / L, untuk mensinergikan dukungan program di masing-masing K / L sesuai dengan arahan *Master Plan* atau Rencana Induk yang telah disusun untuk Kawasan Perdesaan, dan PPKT.

Selain Kepala BPIW, *Talk Series* ini juga menghadirkan Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro. Dalam kesempatan itu ia menjelaskan beberapa hal seperti Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

“Dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mempertahankan nilai budaya dan berorientasi pada peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), di kawasan perdesaan,” ujar Hadi

Dalam paparan Kepala Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gajahmada, Prof. Bakti Setiawan menyatakan perlunya penguatan kerja sama antar kawasan maupun kerja sama regional

Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024. Menurutnya pengelolaan BWN-KP harus mencerminkan semangat kedaulatan negara, karena merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara di Kawasan Perbatasan Negara bukan hanya terbatas pada wilayah ruang fisik, melainkan wilayah secara fungsional pintu keluar-masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (fungsi keberagaman / *multiplisitas*).

Ia juga menyampaikan beberapa hal terkait Arah Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. Salah satu Arah Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara adalah mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan antar negara.

Narasumber lainnya, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf memaparkan langkah-langkah Percepatan Investasi Pariwisata Bahari di Pulau-pulau Kecil / Terluar seperti Pembentukan Tim Akselerasi Investasi PPK / T di Tingkat Pusat (Lintas KL dan Praktisi) dan tingkat Daerah (Forkpimda dan SKPD Terkait). Selain itu Mendorong Percepatan sertifikasi PPK / T sesuai dengan penguasaan lahan di PPK secara *de facto* (penguasaan fisik) dan yang belum dikuasi secara *de facto* atas nama Pemerintah (KKP & Pemda).

“Kita juga memfasilitasi Percepatan Perizinan dan menyusun konsep pengembangan pariwisata bahari pada PPK /T yang telah disertifikasi,” ungkapnya. Selain itu difasilitasi Investasi / mengundang investor untuk bekerja sama dan

mempengaruhi PPK/T yang sudah disertifikasi. Pemapar lainnya yakni dari Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kolonel Laut P. Busro. Menurutnya kerawanan sering terjadi di wilayah perbatasan dan PPKT seperti masalah garis wilayah sebagai akibat belum selesainya penetapan batas wilayah negara. Kerawanan lainnya yakni penangkapan ikan ilegal, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak, perompakan, terorisme, dan narkoba.

Untuk mengatasi hal itu menurut Busro dilakukan pengembangan wilayah pertahanan seperti operasi pengamanan 24 pulau terluar Tahun Anggaran 2020, penguatan pertahanan di lima pulau strategis yang termasuk Pulau Natuna, Pulau Yamdena (Saumlaki / Selaru), Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Kab. Merauke. Selain itu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana posal, pos pamtas, dan sarpras pendukung lainnya.

Dalam paparan Kepala Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gajahmada, Prof. Bakti Setiawan menyatakan perlunya penguatan kerja sama antar kawasan maupun kerja sama regional. Dikatakan pula bahwa pengembangan kerja sama antar kawasan diperlukan karena besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan. “Perlu mengatur kewenangan lintas kabupaten atau lintas provinsi. Selain itu kerja sama Antar Daerah termasuk kebijakan, pengelolaan pengelolaan sumberdaya dan perikanan serta kerjasama ekonomi,” ucapnya.

Ia menilai perlu dibentuk suatu Badan Pengelola bersama dalam rangka memanfaatkan potensi kelautan secara optimal dan



Suasana studio mini Talk Series.

lestari. “Koordinasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang juga diperlukan, termasuk Pengembangan Jaringan Investasi dan Informasi Usaha di bidang kelautan dan perikanan, serta Pengembangan Kemitraan Usaha,” ucapnya.

Acara yang dimoderatori Andara Rainy Ayudini ini diawali kata pengantar dari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan. Ia menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan dari BPIW Virtual Expo, yang menghadirkan tiga *Talk Series*.

Talk Series 3

Millennials Talk: Inovasi Millennial dalam Membangun Negeri

Rangkaian *Talk Series* ke-3 atau yang terakhir dalam rangkaian BPIW *Virtual Expo 2020* menampilkan para generasi *millennial* dari Kementerian PUPR dan juga *Demand Planning and Marketing Strategy* Grab Indonesia, Rizky Ardian Hidayat, pada Jumat, 20 November 2020.

Generasi muda Kementerian PUPR tersebut yakni Arif Dhiaksa dari Ditjen Sumber Daya Air, Wahyu Supriyo Winurseto dari Ditjen Bina Marga, Eki Arsita Rizki dari Ditjen Cipta Karya, Denik Haryani dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, serta Rendy Setiawan dari Ditjen Perumahan. Sementara BPIW menampilkan dua orang generasi mudanya yakni Aji Noor Muhammad dan Akhyar Farizal. Masing-masing pembicara berbagi pengalaman, inovasi, dan gagasan-gagasannya.

Talk Series ke-3 yang ditayangkan di Youtube ini juga menarik perhatian masyarakat. Pasalnya hampir 300 orang mengikuti melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Saat menutup rangkaian *Talk Series*, Kepala BPIW Hadi Suahyono yang diwakili Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti *Talk Series* tersebut. Data dari tim panitia juga menunjukkan pengunjung *web Virtual Expo* BPIW lebih dari 159.165 orang.

Iwan berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, baik internal PUPR maupun kementerian/Lembaga Terkait, Pemerintah Daerah, asosiasi, dan institusi pendidikan.

Talk Series yang dimoderatori Dazen Virilla ini diawali pemaparan dari

Generasi muda
Kementerian PUPR
masing-masing
pembicara berbagi
pengalaman, inovasi,
dan gagasan-
gagasannya.

Generasi muda juga berperan dalam pembangunan jalan tol. Bahkan generasi muda Kementerian PUPR turut berperan membuat *underpass* terpanjang di Indonesia yakni yang berada di Kulon Progo dan mendapatkan rekor MURI.

Arif Dhiaksa dari Ditjen Sumber Daya Air. Ia berbagi pengalamannya bekerja di Balai Teknik Rawa, di mana ia dan timnya harus melakukan kajian pengolahan air rawa di Desa Jangkit Timur, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari pengalamannya itu ia dapat belajar dari cara hidup masyarakat dengan keterbatasan yang ada. Ia pun berhasil berinovasi dengan membuat Pemanfaatan *Smartphone* sebagai Alternatif Pengganti *Automatic Water Level Recorder* (AWLR). Alat Perekam Level Air Otomatis melalui *Smartphone* ini berbuah Penghargaan Teknologi Tepat Guna Kab. Barito Kuala dan mengikuti Seminar Internasional Hathi 2019 di Kupang NTT.

Sementara Wahyu S. Winurseto Dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY Ditjen Bina Marga dalam paparannya mengambil tema Dukungan Millennial dalam Pembangunan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Jalan Bagi Masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukannya seperti mengawal program Padat Karya berupa Revitalisasi Drainase yang bertujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dari Pandemi Covid 19.

"Di musim pandemi ini Ditjen Bina Marga merekrut semua bidang lewat padat karya, memberi sertifikasi gratis, sehingga bila selesai pandemi ini, mereka dapat bekerja di tempat lain," ucapnya. Selain itu, menurutnya generasi muda juga berperan dalam pembangunan jalan tol. Bahkan generasi muda Kementerian PUPR turut berperan membuat *underpass* terpanjang di Indonesia yakni yang berada di Kulon Progo dan mendapatkan rekor MURI.

Pemapar lainnya yakni Eki Arsita Rizki dari Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil tema "*The Injury Time Specialist*". Pembangunan

infrastruktur menurutnya perlu dilakukan secara cepat dan tepat, meski di menit-menit terakhir atau *injury time*. Eki pun turut andil dalam beberapa pembangunan infrastruktur seperti penyiapan Venue Layar Jetski Asian Games 2018 dan Penyiapan *Venue World Cup U-20* pada 2021. Menurutnya penanganan *project "Injury Time"* ini memerlukan perhatian lebih terhadap "*Construction Risk Management*" atau Manajemen Risiko Konstruksi.

Pembicara selanjutnya, Denik Haryani dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengambil tema "*Sharing Session: Creative Thinking for Creative Financing*". Ia menyoroti mengenai *gap* belanja pembiayaan infrastruktur, dimana APBN hanya bisa menyediakan 30 persen. Untuk itu, 70 persen pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui alternatif pembiayaan berupa Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Denik, perekonomian Indonesia diproyeksikan kembali pulih pada Tahun 2023. Untuk itu Skema KPBU menurutnya diharapkan mampu mendorong pulihnya perekonomian Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan menurutnya dengan berkontribusi dan inovasi dalam hal promosi, membuat Aplikasi Alat Skrining Proyek atau *Project Screening Tools Application*, dan berkontribusi dalam hal menyusun FS, *Pipeline* Proyek, Menyusun dokumen lelang KPBU, Koordinator Sekretariat Simpul KPBU PUPR, dan Melelang Proyek Strategis Nasional.

Rendy Setiawan dari Ditjen Perumahan memaparkan mengenai Menjadi *Millennial* di Bidang Penyediaan Perumahan. Ia memaparkan beberapa hal seperti target-target yang harus dicapai Ditjen Perumahan seperti program sejuta rumah yang dicanangkan tahun 2015.



Talk Series 3 melalui video conference

Target itu sendiri sudah dicapai pada 2019, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Menurutnya menjadi insan Kementerian PUPR harus dapat beradaptasi, berimprovisasi, dan berinovasi.

Sementara BPIW menampilkan dua orang generasi mudanya yakni Aji Noor Muhammad dan Akhyar Farizal. Aji memaparkan mengenai Potensi Generasi Millennial Dalam Pembangunan Infrastruktur. Menurutnya generasi *millennial* harus melek teknologi atau memahami teknologi yang berkembang, siap menghadapi kegagalan, cepat beradaptasi, jeli melihat peluang, dan berani mencoba hal baru. “Hal – hal baru akan mendatangkan ide baru atau memberikan skill yang sangat berguna dan *update*,” ungkapnya.

Sedangkan Akhyar Farizal memaparkan mengenai “Pengembangan Wilayah Responsif Bencana Banjir”. Menurut Akhyar dalam konteks penanganan banjir, harus dapat mempertahankan kondisi kawasan di hulu, tengah, dan hilir. Jadi semua area tersebut memiliki fungsi yang sama.

Dikatakannya BPIW merencanakan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah. “Pengembangan wilayah responsif banjir tidak terbatas kawasan. Ketika ada perkembangan wilayah, maka

yang harus diperhatikan adalah kawasan tidak produktif, sehingga dapat menjadi produktif seperti kawasan pertanian lahan kering dan menghindari penggunaan perkebunan lahan basah dan hutan,” ungkapnya.

Demand Planning and Marketing Strategy GRAB, Rizky Ardian Hidayat memberikan motivasi agar kaum muda dapat mengambil peran (baik itu sangat kecil atau penting) dalam membangun bangsa. Selain itu generasi penerus bangsa itu harus selalu memiliki pola pikir untuk berinovasi dan memperbaiki keadaan (bahkan ketika perlu mengubah *status quo*). “Perlu juga memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghasilkan solusi, responsif terhadap tren/peristiwa terkini dan tahu cara menangkap pasar, dan perluas wawasan, dan pengetahuan di bidang yang Anda diminati,” tegasnya.

Saat memberikan pengantar *Talk Series*, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC Benny Hermawan yang mewakili Sekretaris BPIW mengatakan, jumlah generasi muda di Kementerian PUPR mencapai 25 persen dari seluruh pegawai. Dengan banyaknya jumlah pegawai usia muda tersebut, menurut Benny, *Talk Series* terakhir ini sangatlah tepat karena memberikan kesempatan generasi penerus bangsa untuk berbagi pengalamannya.

Generasi *millennial* harus melek teknologi atau memahami teknologi yang berkembang, siap menghadapi kegagalan, cepat beradaptasi, jeli melihat peluang, dan berani mencoba hal baru.

PERAN INFRASTRUKTUR PUPR DI KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI ERA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Entatarina Simanjuntak, ST, MPlan.

Reshinta Hantariningtyas, ST.

Hafnita Linda Liza Mona, ST

*Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I A
BPIW Kementerian PUPR*

1. Pendahuluan

Peristiwa Pandemi Covid 19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara global, menjadi perhatian seluruh dunia dari segala penjuru tanpa kecuali. Negara-negara besar dan kecil, maju dan berkembang, bersama-sama berupaya untuk mengatasi dampak pandemi ini yang sangat memukul khususnya perekonomian dunia. *Economist Intelligence Unit* bahkan telah menyimpulkan bahwa Covid-19 membuat negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G-20) akan masuk ke jurang resesi, yang mana efek dominonya akan mengakibatkan pelambatan ekonomi seluruh dunia (Muhyiddin, 2020). Untuk kasus Indonesia, PDB Indonesia mengalami kontraksi 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020, terendah sejak kuartal pertama tahun 1999. Kemudian pada kuartal ketiga kondisi membaik ke angka -3,49%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk mengatasi fenomena tersebut. Sejak Februari 2020,

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan puluhan paket kebijakan lintas kementerian/lembaga yang bertujuan mereformulasi perencanaan dan penganggaran untuk menanggulangi Pandemi Covid-19, menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan mencegah terjadinya kegagalan ekonomi (Arnolly, 2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan *refocusing* anggaran selama masa pandemi covid-19 sebesar Rp 44,5 triliun. Selain itu, anggaran sebesar Rp 13,4 triliun disalurkan untuk program-program padat karya, yaitu infrastruktur PUPR berbasis masyarakat.

Selain program padat karya, berbagai kebijakan masih terus dikembangkan di Kementerian PUPR untuk turut serta mempercepat pemulihan ekonomi Nasional. Salah satu yang saat ini sedang dilaksanakan di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) adalah penyusunan rekomendasi program prioritas infrastruktur PUPR mendukung revitalisasi 10 Wilayah Metropolitan (WM) di



Jakarta salah satu dari 10 metropolitan Nasional yang paling terdampak perlambatan ekonomi

Sumber: Istimewa

Indonesia. Pada kesepuluh WM tersebut terjadi konsentrasi penduduk dan ekonomi yang cukup besar sehingga dinilai sebagai *centers of growth*. Aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan merupakan alat pertumbuhan ekonomi (Bappenas 2019).

Di tengah tingginya harapan terhadap wilayah metropolitan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional, Pandemi Covid 19 menyebabkan pukulan yang sangat berat terhadap ekonomi WM. Kawasan perkotaan menjadi epicentrum penyebaran Covid 19 yang berdampak pada banyaknya aktivitas ekonomi yang terhenti dan peningkatan tajam jumlah pengangguran. Pelambatan ekonomi di sepuluh kawasan metropolitan telah mempengaruhi secara signifikan pelambatan ekonomi nasional. Dalam kebijakan pemulihan ekonomi Nasional, kawasan perkotaan metropolitan menjadi lokus prioritas penanganan pandemic, termasuk fokus dukungan infrastruktur PUPR.

2. Sosial – Ekonomi Kawasan Metropolitan di Era Pandemi Covid 19

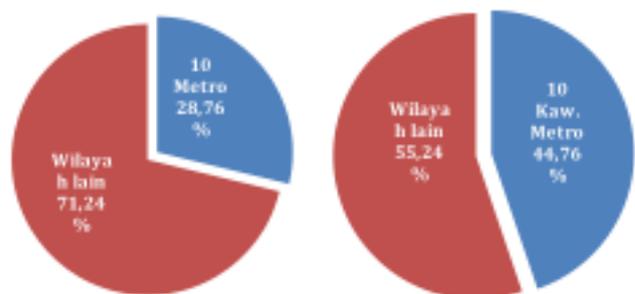
2.1 Kawasan Perkotaan Metropolitan: Konsentrasi Penduduk dan Ekonomi

Wilayah metropolitan menjadi pusat konsentrasi penduduk dan berbagai aktivitas ekonomi yang beragam. Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah metropolitan di Indonesia adalah 3.606 jiwa/km² pada tahun 2019, dengan Jabodetapungjur yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 10.532 jiwa/km². Total jumlah penduduk di 10 kawasan metropolitan mencapai 28% dari total jumlah penduduk Nasional, dengan persentase penduduk Gerbangkertasusila dan Cekungan Bandung adalah

dua terbesar setelah Jabodetabek.

Selain jumlah penduduk yang besar, aktivitas ekonomi yang beragam di dalam suatu wilayah perkotaan yang luas dan padat menjadikan wilayah metropolitan sebagai kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah PDRB 10 Wilayah Metropolitan berperan menyumbang ±44,76% PDRB Nasional. Hal ini memperlihatkan wilayah metropolitan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Grafik Persentasi Penduduk dan PDRB Kawasan Metropolitan terhadap Nasional



Persentase Jumlah Penduduk terhadap Total Nasional

Persentase PDRB terhadap PDRB Nasional

Sumber: BPS 2020

2.2 Sektor-sektor Utama Kawasan Perkotaan yang Terpuruk dan Bertahan

Sektor ekonomi utama di 10 kawasan metropolitan adalah pada umumnya industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Khusus untuk Sarbagita, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi kontributor utama terhadap PDRB kawasan. Sektor industri pengolahan menjadi sektor penggerak utama Wilayah Metropolitan di Indonesia, selain di Kawasan Metropolitan Bimindo

dan Sarbagita. Di Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung, Kedungsepur, dan Gerbangkertasusila, industri pengolahan bahkan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB, dan di metropolitan lainnya sektor ini adalah kontributor kedua dan ketiga.

Di Era Pandemi Covid 19 ini, sektor-sektor ekonomi kawasan perkotaan tersebut mengalami keterpurukan. Pada triwulan III, sektor industri pengolahan terkontraksi sebesar 4,31% yang pada umumnya disebabkan oleh menurunnya permintaan domestik dan luar negeri yang masih belum pulih; sektor perdagangan terkontraksi 5,03% karena sepi pusat-pusat perbelanjaan; konstruksi 4,52% akibat penurunan impor bahan bangunan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum bahkan mencapai -11,86% karena penurunan kunjungan wisatawan dan maraknya MICE (*meeting, incentives, conferencing, and exhibitios*) secara virtual. Hanya sektor pertanian yang tetap tumbuh sebesar 2,15% disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap tanaman pangan dan ekspor hasil perkebunan.

Keterpurukan sektor utama kawasan perkotaan ini berimplikasi sangat buruk terhadap ekonomi kawasan. Salah satu yang nyata terlihat adalah tingkat pengangguran terbuka yang meningkat signifikan terutama di kawasan perkotaan, yaitu hampir 3% kenaikannya dibandingkan tahun 2019, sedangkan di perdesaan hanya meningkat sekitar 1%.

Sektor Ekonomi Penyumbang PDRB Terbesar di 10 Kawasan Metropolitan



Ket: huruf tebal artinya sektor ekonomi utama

Sumber: BPS 2020

2.3 Munculnya Sektor-Sektor Ekonomi Baru Perkotaan

Keterpurukan sektor-sektor ekonomi utama perkotaan menimbulkan ketidakseimbangan sistem. Ketidakseimbangan ini masih akan terus berlanjut hingga waktu yang tidak dapat diperkirakan sampai akhirnya muncul keseimbangan baru.

Permintaan domestik dan luar negeri terhadap sektor ekonomi masih belum pulih. Berbagai sektor ekonomi baru bermunculan untuk merespons permintaan baru. Salah satu sektor ekonomi yang marak perkembangannya adalah sektor ekonomi berbasis digital seperti bisnis online. BPS mencatat bahwa pada April 2020 saja, penjualan online sudah mencapai 4,8 kali penjualan Januari 2020.

Sektor kesehatan juga meningkat selama era pandemi. Data BKPM menunjukkan bahwa pada Bulan April setidaknya terdapat 4.042 IOK (izin operasional/komersial) Kemenkes, diterbitkan. Permohonan IOK dari sektor kesehatan pada enam bulan pertama tahun ini mencapai 16.286, menggeser sektor perdagangan yang selalu di urutan paling atas.

3. Implikasi terhadap Dukungan Infrastruktur PUPR

Pemulihan ekonomi Nasional merupakan kata kunci pembangunan saat ini, meskipun pada hakikatnya hal tersebut sulit dilakukan ketika pandemi masih terus berlangsung sampai vaksin Covid 19 ditemukan. Ketidakpastian ekonomi dan sosial sangat besar dan Kementerian PUPR dituntut untuk memberi dukungan secara tepat sasaran.

Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa infrastruktur memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur terbukti membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana wilayah dengan infrastruktur yang memadai

mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur juga menyerap banyak tenaga kerja dan memicu pergerakan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pembangunan. Percepatan pemulihan ekonomi hanya akan terjadi jika dukungan infrastruktur menasar *locus* dan *focus* yang tepat.

masa mendatang.

Intervensi kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi melalui pengembangan wilayah metropolitan Mebidangro berbasis sektor ekonomi utama diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi $\pm 5\%$ dan penyerapan tenaga kerja (khusus untuk sektor industri, penyerapan tenaga kerja mencapai $\pm 1,7$ juta jiwa), angka ini belum termasuk jika KEK Sei Mangkei *full* beroperasi. Dukungan infrastruktur seperti jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas, suplai air baku untuk industri, serta infrastruktur permukiman dan perumahan bagi para pekerja sektor industri dan perdagangan harus dipersiapkan untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang.

3.3 Sektor Ekonomi Baru Perkotaan: Pertimbangan Dukungan Infrastruktur PUPR

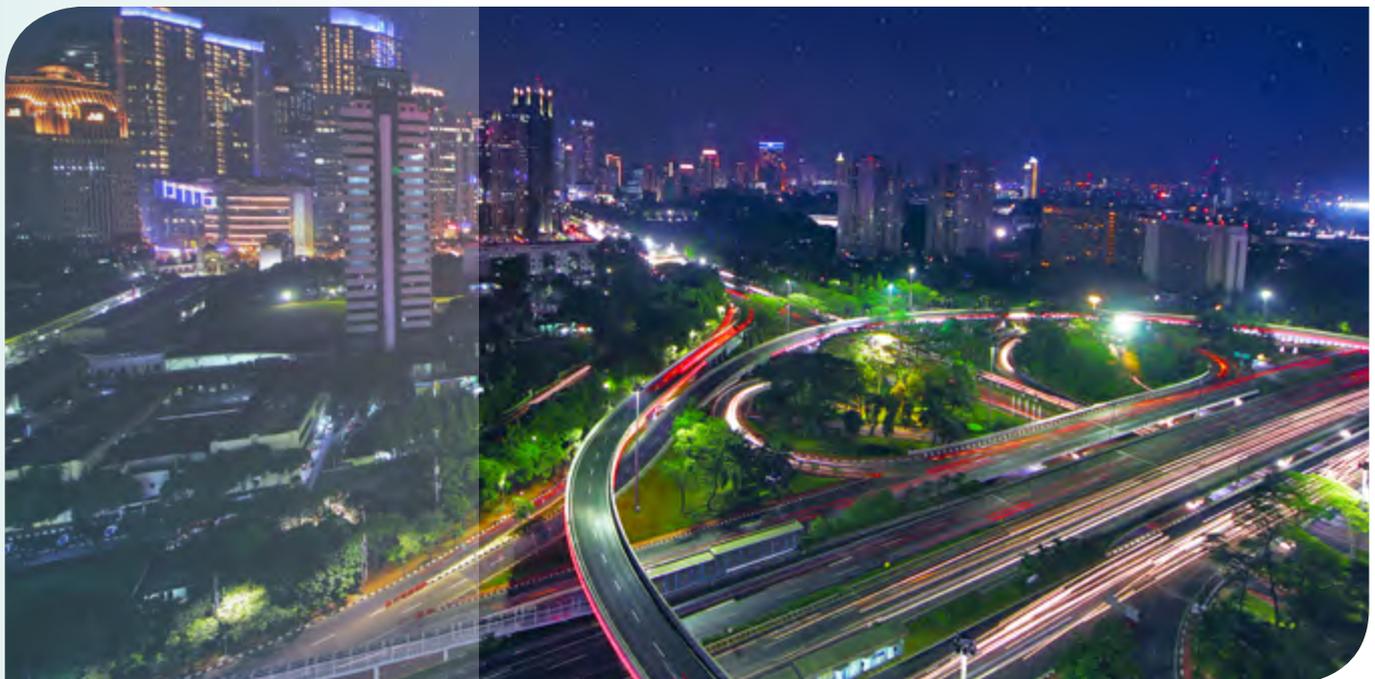
Munculnya sektor-sektor ekonomi baru sebagai respon terhadap fenomena saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kehidupan di perkotaan metropolitan harus mulai terbiasa dengan sistem digital dan pengurangan mobilitas ke tempat-tempat pertemuan/kegiatan. Kebiasaan baru bekerja dan belajar dari rumah yang berdampak pada berkurangnya mobilitas dan waktu yang dihabiskan di rumah menjadi lebih banyak, perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan dukungan infrastruktur PUPR.

Pandemi ini mengajarkan efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan perkotaan. Aktivitas ekonomi bergerak ke arah *spaceless* sedikit banyak akan mempengaruhi arah dan kebijakan infrastruktur PUPR. Elemen ruang yang membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR terus bertambah dan bermodifikasi menyesuaikan permintaan di era pandemi.

4. Penutup dan Rekomendasi

Untuk mengefisienkan dukungan infrastruktur PUPR di era pandemi ini, fenomena perubahan pasar dan permintaan perlu menjadi basis dalam perumusan kebijakan. Dukungan dapat dibedakan antara bersifat tanggap darurat di era pandemi dan bersifat antisipatif terhadap permintaan pasca pandemi. Untuk dukungan tanggap darurat, program padat karya infrastruktur PUPR menjadi jawaban yang paling tepat. Program ini telah berhasil menjaga denyut nadi perekonomian dengan membuka peluang lapangan kerja bagi ratusan ribu orang. Mengingat pandemi masih terus berlanjut, program padat karya tersebut masih perlu terus dilanjutkan.

Dukungan infrastruktur PUPR yang bersifat antisipasi terhadap permintaan pasca pandemi juga harus menjadi perhatian. Dengan memahami bahwa elastisitas pemulihan setiap sektor ekonomi perkotaan berbeda-beda, maka intervensi dukungan



Kementerian PUPR mendukung perkembangan kota Metropolitan sebagai pendorong ekonomi

Sumber: Istimewa



Metropolitan sebagai jantung ekonomi

Sumber: PUPR

infrastruktur PUPR juga perlu menyesuaikan. Misalnya, sektor ekonomi yang ketergantungannya tinggi terhadap kondisi pemulihan ekonomi global relatif akan lebih lambat pulihnya. Dukungan infrastruktur yang terlalu 'over' pada sektor ekonomi ini dapat mengurangi peluang perkembangan sektor ekonomi domestik yang dinamis dan cepat pulih. Dengan demikian, diperlukan analisa yang mendalam terkait *backwash and forward linkage* sektor ekonomi kawasan perkotaan metropolitan yang akan didukung oleh infrastruktur PUPR sehingga dukungan infrastruktur PUPR dapat tepat sasaran dan pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.

Referensi

Arnolly, A. 2020, 'Menimbang Perencanaan Pembangunan di Era Pandemi COVID-19', diunduh pada tanggal 30 November 2020 dari <http://kajanglako.com/id-11100-post-menimbang-perencanaan-pembangunan-di-era-pandemi-covid19.html>

Bappenas 2019, 'Menteri Bambang Beri Arah

'Pengelolaan 10 Wilayah Metropolitan Indonesia', diunduh pada tanggal 30 November 2020 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-beri-arahan-pengelolaan-10-wilayah-metropolitan-indonesia/>

BPS 2020, 'Tinjauan Big Data terhadap Dampak Covid 19'.

BPS 2020, 'Berita Resmi Statistik', 5 November 2020.

Muhyiddin 2020, 'Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia', *The Indonesian Journal of Development Planning*, Volume IV No. 2, hal. 240 – 252.

Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah, Teori & Aplikasi*.

Pemerintah Daerah Perlu Selalu Dilibatkan pada Proses Pembangunan Infrastruktur

Sri Indah Wibi Nastiti, S.Si, M.Si.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)



Upaya Pemerintah untuk mengatasi dampak akibat pandemi Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sangat baik, karena bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan menguatkan kapasitas ekonomi para pelaku usaha baik UMKM, korporasi bahkan BUMN. Kita ketahui bahwa akibat pandemi Covid-19 telah memberikan dampak di berbagai sektor/aspek dan menimpa semua pihak, tidak pandang kecil maupun besar. Upaya yang dilakukan melalui program PEN ini juga telah berjalan walaupun belum 100 persen, namun setidaknya telah membantu para pelaku usaha untuk tetap bertahan di tengah krisis ini.

Pinjaman PEN daerah ini dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 cukup parah.

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah. Pinjaman PEN Daerah disalurkan melalui *Special Vehicle Mission* Kementerian Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI). Pemerintah sendiri telah menyiapkan pinjaman daerah untuk program PEN di tengah pandemi Covid-19.

Pinjaman PEN daerah ini dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 cukup parah. Baru beberapa daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan dana pinjaman. Program pinjaman ini memiliki perbedaan dengan pinjaman daerah seperti biasanya antara lain lebih longgar, proses dan prosedurnya lebih cepat.

Pemerintah memberikan program bantuan dengan kemudahan dan dispensasi pada proses perbankan untuk pelaku usaha termasuk UMKM sepertinya kurang efektif, mengingat masih banyak UMKM yang belum menggunakan akses perbankan. Kelemahan UMKM ini di sisi lain perlu mendapat pendampingan untuk lebih mengenal skema perbankan, di sisi lain perlu ada pilihan bantuan bagi UMKM yang belum menggunakan skema perbankan.



Program padat karya tunai PUPR

Sumber eppid.pu.go.id

Aspek lain kelemahannya adalah data. Data merupakan kelemahan yang dirasakan di hampir semua aspek/sektor. Data UMKM mungkin belum semua terkompilasi dengan baik sehingga program yang diperuntukkan pun belum tentu tepat sasaran. Selain juga koordinasi antar kementerian/lembaga untuk pengintegrasian data maupun penyusunan program.

Dari aspek pinjaman daerah, masih dianggap belum banyak daerah yang memanfaatkan skema pinjaman daerah ini. Hal disebabkan banyak tantangan yang dihadapi daerah antara lain tahapan yang dianggap cukup panjang, sumber daya manusia di daerah yang belum memadai dan kekurangiapan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan perlunya ada penyederhanaan proses, bimbingan dan pendampingan Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah, sinkronisasi peraturan perundangan untuk lebih memudahkan dan menghindarkan kebingungan Pemerintah Daerah.

APEKSI mungkin tidak berperan langsung dalam mendukung pengembangan program pemulihan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi yang berperan sebagai representasi Pemerintah Kota (Pemkot), APEKSI menjalankan peran-peran peningkatan

kapasitas maupun advokasi atas berbagai kebutuhan Pemkot serta penyebaran informasi pada semua Pemkot, maka APEKSI memberi dukungan kepada Pemerintah terkait diseminasi peraturan perundangan, mensosialisasikan kebijakan, dan advokasi kebijakan jika terdapat kendala di Pemkot maupun proses berbagi pengalaman baik antar Pemkot.

Sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan APEKSI selama masa pandemi antara lain mendiseminasi berbagai peraturan perundangan terbaru terkait kebijakan menghadapi pandemi kepada seluruh Pemkot, membantu pemerintah pusat dalam pengumpulan data Pemkot, dan menyelenggarakan sejumlah webinar untuk peningkatan wawasan serta peluang kolaborasi termasuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

APEKSI sendiri melalui program kerjasama dengan *United Cities and Local Government Asia Pacific* (UCLG ASPAC) sejak tahun 2018 dalam program *Localise*

APEKSI menjalankan peran-peran peningkatan kapasitas maupun advokasi atas berbagai kebutuhan Pemkot serta penyebaran informasi pada semua Pemkot



Program padat karya tunai BPS

Sumber InfoPublik

SDGs, selama masa pandemi ini menjalankan sejumlah kegiatan sebagai upaya membantu Pemerintah Daerah dalam menghadapi pandemi.

Kegiatan tersebut selain kajian berbagai aspek yang terdampak dari pandemi, melakukan diskusi daring berbagai isu yang terdampak pandemi, *match making* untuk mempertemukan para Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak yang berpeluang untuk terbangun kolaborasi dalam menghadapi persoalan yang dihadapi pada masa pandemi serta *coaching clinic* yaitu memberikan asistensi terhadap isu-isu khusus yang ingin dikembangkan dalam menghadapi pandemi.

Sebagai contoh isu yang diangkat adalah pertanian perkotaan (*urban farming*), maka diselenggarakan

diskusi daring dengan mengundang sejumlah narasumber kompeten di bidang tersebut termasuk para *start-up/provider/praktisi* maupun para UMKM yang mulai berkembang dalam isu tersebut. Setelah itu dilakukan *match making* untuk mempertemukan Pemerintah Daerah yang ingin mengembangkan program tersebut dalam rangka mendampingi masyarakat/UMKM di daerahnya. Kemudian dilakukan *coaching clinic* dimana para Pemerintah Daerah mendapat asistensi secara fokus oleh para *start-up/provider/praktisi* yang dapat membantu Pemerintah Daerah mengembangkan program tersebut.

Pembangunan infrastruktur dapat menyerap tenaga kerja untuk menghindari pengangguran yang tinggi

dan untuk peningkatan infrastruktur itu sendiri. Dimana untuk proses pembangunan secara umum maupun dalam masa penanganan pandemi saat ini infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan. Dengan infrastruktur yang memadai, maka proses pembangunan, pemerataan pembangunan akan semakin baik dan tingkat perekonomian diharapkan meningkat juga. Dengan infrastruktur yang baik, maka penanganan pandemi juga diharapkan lebih lancar walaupun sebenarnya faktor kuncinya tetap pada menjaga protokol kesehatan.

Program Padat Karya Tunai (PKT) oleh Kementerian PUPR dianggap cukup membantu masyarakat untuk bertahan dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan tetap mendukung program infrastruktur Pemerintah Daerah berjalan sesuai perencanaan. Program-program yang dilaksanakan dalam program PKT juga sangat penting untuk dilaksanakan mengingat sektor-sektor tersebut merupakan sector-sektor krusial untuk penanganan persoalan perkotaan seperti penanganan kota tanpa kumuh (kotaku), pengelolaan sampah 3R, dan penyediaan air minum dengan Pansimas dan sanitasi dengan Sanimas.

Pemerintah Daerah mengharapkan program-program ini terus dikembangkan dan didukung agar proses penanganannya yang selama ini terus dikembangkan tidak terhambat. Bahkan program Kotaku yang dianggap cukup berhasil dan bermanfaat sangat diharapkan terus dikembangkan di berbagai daerah. Program Kotaku sebagai upaya menghilangkan kumuh, pengelolaan sampah 3R, Pansimas dan Sanimas yang memang dijalankan oleh masyarakat tentu akan sangat membantu masyarakat selain pengembangan program infrastrukturnya juga untuk membantu perekonomian mereka. Sehingga diharapkan program-program padat karya ini terus dikembangkan bahkan tidak dalam skema pemulihan di masa pandemi saja.

Pengembangan kawasan pariwisata, metropolitan, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, walaupun program-program ini merupakan program nasional, namun diharapkan ada keterlibatan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lain agar program tersebut betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat secara umum dan khususnya untuk peningkatan perekonomian.

Pemerintah Daerah perlu selalu dilibatkan dari proses pengusulan, perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring, hingga evaluasi pembangunan infrastruktur. Karena program-program tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan bersentuhan dengan wilayah maupun kewenangan Pemerintah Daerah. Seperti pengembangan kawasan industri, tentu akan terkait dengan tata ruang, keterlibatan masyarakat dan yang perlu ada Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa program tersebut tidak bertabrakan dengan RTRW atau tidak bertentangan dengan budaya maupun kehendak masyarakat.

Hal ini termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ada insentif kepada kawasan ekonomi khusus akan mendapat keringanan pajak dan sebagainya tentu akan berdampak pada pendapatan daerah, hal ini tentu perlu keterlibatan pemda atau diskusi dengan pemda terkait konsekuensi yang perlu ditanggung pemda ini. Hal ini tentunya sebagai upaya agar program nasional dapat berjalan baik namun juga sesuai dengan harapan daerah dan masyarakat di sekitar secara khusus maupun secara umum. Tentunya kawasan tersebut juga harus memberikan dampak positif baik dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial sehingga dapat terjaman keberlanjutannya.

**Program Padat Karya
Tunai oleh Kementerian
PUPR dianggap cukup
membantu masyarakat
untuk bertahan
dan bangkit dari
keterpurukan akibat
pandemi**

Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Infrastruktur PUPR Mendukung Sektor Pertanian

Hasna Widiastuti, ST, MEngSc

Analisis Kebijakan Madya
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I BPIW

Dalam masa pandemi Covid 19, nilai ekspor hasil pertanian Indonesia pada bulan September 2020 meningkat sebesar 16,51 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, paling tinggi di antara ekspor non migas lainnya. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020, hanya sektor pertanian yang tumbuh positif yaitu sebesar 2,15 persen, sementara sektor lain terkonstraksi. Pandemi ini seakan mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan melalui peningkatan sektor pertanian. Tantangan sektor pertanian adalah peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah pertanian. Infrastruktur PUPR diperlukan untuk mendukungnya.

Pendahuluan

“Indonesia adalah negara agraris” itu mungkin kalimat yang kita sering dengar sejak di pendidikan dasar. Di era industrialisasi, kalimat tersebut mungkin sudah mulai terlupakan. Saat ini ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia, sektor pertanian menjadi menarik perhatian. Sektor pertanian selama ini memberikan kontribusi yang

cukup besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor ini berkontribusi di kisaran angka 13 persen setelah industri pengolahan dan perdagangan seperti yang diperlihatkan dalam data BPS berikut. Bahkan di tahun 2016 dan 2017 menduduki ranking kedua setelah industri pengolahan.

Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2016-2019

Berdasarkan kewilayahan, kontribusi ekonomi Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi PDB nasional. Kontribusi ekonomi paling tinggi adalah Pulau Jawa sebesar 60,1 persen dan peringkat kedua adalah Pulau Sumatera sebesar 21,6 persen (tahun 2018). Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, lapangan usaha A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/*Agriculture, Forestry dan Fishing*) selalu menjadi tiga besar sumber PDB seluruh propinsi di kedua pulau tersebut.

Saat ini peran ekspor non migas terus meningkat dibandingkan ekspor migas. Sektor pertanian masuk dalam tiga besar ekspor non migas setelah industri pengolahan dan pertambangan. Perkembangan ekspor pertanian selama 5 tahun terakhir (2014-2019) memang menunjukkan tren yang berfluktuatif namun di tahun 2019 nilai ekspor sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 5,29 persen (BPS, 2019).

Dalam masa pandemi Covid 19 dan di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang kurang baik, sektor pertanian menunjukkan ketahanannya baik dari pertumbuhan ekonomi maupun nilai ekspor. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan satu sampai dengan tiga tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 (BPS, 2020). Sementara pada periode yang sama, sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen sedangkan sektor lain berkonstraksi.

Nilai ekspor hasil pertanian Indonesia pada bulan September 2020 meningkat sebesar 16,51 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, paling tinggi di antara ekspor non migas lainnya. Sementara ekspor hasil industri pengolahan hanya naik 6,48 persen dan bahkan hasil tambang turun sebesar 35,97 persen.

Berbagai gambaran tersebut di atas memperlihatkan bahwa sektor pertanian seharusnya dapat menjadi sektor andalan ke depan untuk peningkatan ekonomi Indonesia pada umumnya dan ketahanan pangan khususnya.

Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Sektor Pertanian

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, sektor pertanian termasuk dalam tujuh agenda Presiden yaitu agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan



yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam agenda ini pangan dan pertanian menjadi salah satu sumber daya ekonomi yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran PDB dalam RPJMN 2020-2024 untuk pertanian sebesar 3,8-3,9 dari capaian RPJMN sebelumnya 3,7. Strategi yang dilakukan adalah transformasi struktural dengan meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian.

Selain itu dalam tujuh agenda Presiden tersebut juga ada agenda mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kedua agenda ini sangat berkaitan. Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah. Pengembangan wilayah ini pun harus selaras antara rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) pun sudah ditetapkan kawasan-kawasan andalan yang mempunyai

unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan. Sangat penting untuk memahami wilayah-wilayah mana saja yang sesuai peruntukannya agar sektor-sektor ini dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Bahkan dalam Rencana Tata Ruang Pulau (RTR Pulau) disebutkan bahwa penataan ruang di Pulau Jawa ditujukan untuk lumbung pangan utama nasional di samping Pulau Sumatera.

Permasalahan dan Tantangan Sektor Pertanian dan Dukungan Infrastruktur PUPR

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam genetik yang melimpah bila dibandingkan dengan negara lain. Namun, sumber daya ini harus dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat termasuk menanggulangi permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

Pendekatan berkelanjutan mulai dari produksi sampai dengan konsumsi sangat penting bagi peningkatan sektor pertanian. Apalagi saat ini dunia dihadapkan dengan isu perubahan iklim dan masalah pencemaran lingkungan.

Secara garis besar, permasalahan dan tantangan dalam sektor pertanian dapat dibagi menjadi dua yaitu terkait produktivitas pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Produktivitas pertanian masih mempunyai permasalahan terkait teknis dan teknologi pertanian, alih fungsi lahan dan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian diperlukan hilirisasi produk pertanian dan peningkatan sistem logistik pertanian.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa walaupun capaian pembangunan terkait sumber daya dalam periode pembangunan tahun 2015-2019 menunjukkan capaian positif, namun beberapa hal berikut masih perlu ditingkatkan. Pertama, keterhubungan antara sentra produksi pangan dan wilayah dengan permintaan pangan tinggi; kedua, kecukupan pasokan dan kualitas pangan di wilayah rentan kelaparan, stunting, kemiskinan dan perbatasan; dan ketiga integrasi data produksi pangan strategis dengan realisasi impor.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjajarin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Agenda Presiden dalam RPJMN 2020-2024 terkait Sektor Pertanian dan Pengembangan Wilayah

Untuk peningkatan produksi pertanian dibutuhkan sumber air baku yang mendukung. Sumber air baku diperoleh baik dari waduk maupun pembangunan bendungan dan embung. Infrastruktur penampungan air masih terbatas jumlahnya sementara volume tampungan waduk yang ada mengalami penurunan volume akibat sedimentasi. Rata-rata penurunan volume tersebut hingga tahun 2019 mencapai 19 persen, bahkan di Pulau Jawa mencapai 31 persen. Belum lagi ada permasalahan pasokan air irigasi yang rendah dari bendungan yaitu baru mencapai 12,3 persen dari keseluruhan luas daerah irigasi di tahun 2019.

Selain itu juga diperlukan program pembangunan daerah irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pemilihan prioritas wilayah sangat penting untuk dikoordinasikan antar pihak terkait baik di pusat maupun di daerah misalnya mengenai rencana lahan pertanian baru, kebutuhan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier serta masalah alih fungsi lahan.

Selama pandemi Covid 19 ini Kementerian PUPR telah melaksanakan program Padat Karya Tunai untuk mendukung sektor pertanian. Program tersebut antara lain melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Untuk meningkatkan industri pertanian sebagai upaya hilirisasi pertanian, infrastruktur menjadi aspek yang penting agar investasi dapat masuk ke dalam kawasan industri. Infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dengan sentra produksi. Selanjutnya juga diperlukan infrastruktur yang mengantarkan produksi pertanian ke konsumen. Sistem logistik pertanian tidak hanya membutuhkan pengembangan pemasaran tapi juga infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan. Program infrastruktur ini tentu saja perlu koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk direncanakan dan diprogramkan.

Keberhasilan kinerja produktivitas pertanian dan nilai tambah produk pertanian ini tidak terlepas dari

keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur serta diperlukan prioritas wilayah yang didukung infrastrukturnya dalam periode pembangunan lima tahun mendatang.

Kesimpulan

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekalipun dalam kondisi pandemi Covid 19 seperti saat ini. Melalui sektor inilah diharapkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi dapat dilakukan. Pemerintah perlu merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah produk pertanian.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, perlu peningkatan keterpaduan dan efektifitas anggaran. Prioritas kawasan perlu disepakati dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pembangunan infrastruktur dapat dibagi dalam rencana dan program tahunan dan jangka menengah. Dalam dua sampai tiga tahun mendatang diperlukan pembangunan infrastruktur padat karya yang mendukung peningkatan sektor pertanian sendiri dan dapat memulihkan ekonomi masyarakat karena menyerap tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur PUPR dalam jangka menengah perlu dituntaskan berbagai pembangunan embung, bendungan, jaringan irigasi dan infrastruktur jalan. *Pulihkan ekonomi nasional melalui pertanian.*

Referensi:

BPS, 2020, *Berita Resmi Statistik 5 November 2020*
BPS, 2020, *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, September 2020*
BPS, 2020, *Analisis Komoditas Ekspor, 2012-2019, Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan RPJMN 2020-2024*
RTRWN
Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Kiprah “Tiga Srikandi BPIW” Dibalik Kesuksesan Penyelenggaraan BPIW *Virtual Expo*



BPIW virtual
EXPO 2020

Setelah melakukan persiapan yang matang, akhirnya BPIW Kementerian PUPR sukses menyelenggarakan BPIW Virtual Expo 2020. Kesuksesan tersebut, tak terlepas dari kerja sama semua pihak, dari pimpinan tertinggi BPIW hingga staf. Dari sekian banyak orang yang berperan dibalik layar persiapan expo tersebut, ada “Tiga Srikandi BPIW” yang berperan besar dalam mempersiapkan perhelatan akbar tersebut. Mereka adalah Alis Listalatu, Tiara Titi Kartika, dan Rikawati. Bagaimana kiprah para wanita muda ini?, berikut hasil perbincangan “Sinergi” dengan ketiganya dalam tulisan berikut ini.

Berjibaku dengan Persiapan yang Singkat



Alis Listalatu, S.T., M.Sc

Koordinator BPIW Virtual Expo/ Subkor Pelaksana Tugas Data dan Informasi Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Sekretariat BPIW Kementerian PUPR

Srikandi yang pertama, Alis Listalatu, yang bertugas sebagai Subkor Pelaksana Tugas Data dan Informasi di Sekretariat BPIW Kementerian PUPR. Ia dan timnya, BPIW pernah meraih *Website* Terbaik Kategori Unit Organisasi di Kementerian PUPR

pada tahun 2017. Setelah sebelumnya berkiprah di Bagian Program dan Evaluasi, di era struktur baru ia bergabung dengan Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik (Bagian HKKkompu).

Dipilih sebagai koordinator di acara besar itu, “Srikandi BPIW” ini menjadi orang super sibuk, karena harus mengkoordinasikan semua hal, mulai dari mempersiapkan materi *virtual expo* hingga acara penutupan. Ia pun harus berjibaku dengan waktu persiapan yang singkat.

.....
Ada “Tiga Srikandi BPIW” yang berperan besar dalam mempersiapkan perhelatan akbar tersebut. Mereka adalah Alis Listalatu, S.T., M.Sc, Tiara Titi Kartika, S.I.Kom, MA, dan Rikawati, ST, MT.

.....

Tidak hanya berkoordinasi dengan rekan-rekan di BPIW, dari mulai persiapan hingga pelaksanaan, Alis dan tim-nya juga berkoordinasi dengan Biro Komunikasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, terutama untuk fasilitasi hosting Web Expo di digitalexpo.pu.go.id.

Saat diwawancarai “Sinergi” beberapa waktu lalu, Alis menuturkan bahwa penyelenggaraan BPIW Expo secara cukup konsisten dilakukan sejak tahun 2015 dalam rangka mempublikasikan produk-produk BPIW yang telah disusun. Namun, dikarenakan Pandemi Covid-19, penyelenggaraan BPIW Expo tahun ini dilaksanakan secara virtual.

Sama seperti kegiatan lain, penyelenggaraan BPIW Virtual Expo memiliki *goal* tersendiri. Tujuan Expo ini yaitu untuk mempublikasikan hasil-hasil kajian BPIW, terutama yang terkait dengan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau kecil 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), kawasan pariwisata, dan kawasan strategis lainnya.

Expo ini juga mempunyai *goal* lain, yakni untuk meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, yaitu mitra-mitra kerja BPIW, Kementerian PUPR, seperti Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan dunia usaha/swasta.

Sebagai Subkoordinator Data dan Informasi di Bagian HKKkompu, Alis diamanahi untuk mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan BPIW Virtual Expo tahun 2020 ini. “Pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kepala BPIW, Bapak Sekretaris BPIW, Bapak Kapuswilnas dan Kapuswil I,II,III, serta bantuan dan dukungan dari rekan-rekan di BPIW serta *stakeholder* terkait lainnya,” ujar Alis.

Persiapan penyelenggaraan BPIW Virtual Expo terbilang singkat, yakni hanya sekitar satu bulan saja. Dengan waktu yang sedikit itu, menjadi tantangan tersendiri bagi Alis dan juga BPIW. Selain itu, metode

penyelenggaraan expo secara virtual juga menjadi pengalaman bagi BPIW karena pertama kali dilakukan. Untuk itu, ia dan tim juga menyiapkan skenario atau *plan* acara Expo yang dilakukan karena walaupun dilakukan virtual, tetap harus didukung oleh kegiatan secara *offline*.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, upaya ekstra pun harus dilakukannya, karena sangat terkait dengan beberapa hal seperti teknologi informasi dalam penyajian *web expo*, teknis acara melalui *video conference*, pelaksanaan pembukaan yang dilakukan dengan metode kombinasi (di Auditorium Kementerian PUPR dan melalui media *zoom* dan *youtube live streaming*), serta penyiapan mini studio di Gedung BPIW untuk penyelenggaraan *Talk Series*.

Disamping itu, Alis diamanahi tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan BPIW Virtual Expo 2020 ini dapat diwujudkan ke dalam bentuk/format acara yang disepakati bersama, seperti untuk panel pameran, *web expo*, pembukaan expo, rangkaian *Talk Series*, dan penutupan *virtual expo*.

Tidak hanya berkoordinasi dengan rekan-rekan di BPIW, dari mulai persiapan hingga pelaksanaan, Alis dan tim-nya juga berkoordinasi dengan Biro Komunikasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, terutama untuk fasilitasi *hosting Web Expo* di digitalexpo.pu.go.id.

“Saya juga melakukan monitoring acara secara keseluruhan, termasuk interaksi pengunjung di *web expo*, sehingga acara ini tidak hanya sekedar dilaksanakan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi para pengunjung *expo* dan peserta *Talk Series*,” jelas Alis. Tidak hanya masa persiapan, usai menggelar



Pelaksanaan Talk series 2

Sumber: BPIW

kegiatan tersebut, Alis dan tim juga mengidentifikasi beberapa poin-poin perbaikan untuk penyelenggaraan BPIW Expo di tahun-tahun mendatang.

Dari sekian banyak tugas yang dilakukan untuk penyelenggaraan *expo* ini, pertama kali yang dilakukannya adalah menyusun rancangan tujuan, tema, dan bentuk acara dari BPIW *Virtual Expo 2020* tersebut bersama tim kecil di Sekretariat dan empat Pusat Wilayah di lingkungan BPIW.

“Tujuan dan tema dari acara yang ditentukan di awal sangat mempengaruhi *setting* acara yang ingin kita wujudkan. Adapun tema yang akhirnya dipilih adalah Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Pengembangan Wilayah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional,” ucapnya lagi.

Dari tema tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa tematik untuk panel-panel *expo*-nya termasuk untuk tema *Talk Series*. Pada tahap awal ini Alis dan timnya juga menyusun *time plan*-nya dari mulai persiapan, pelaksanaan, hingga pasca acara *Expo*.

Tidak hanya pameran virtual, kegiatan ini juga diisi dengan tiga *Talk Series* yang dimaksudkan sebagai wadah berdiskusi antar pemangku kepentingan. “Melalui diskusi ini, diharapkan sinergi antara BPIW dan Kementerian PUPR dengan mitra-mitranya akan terus meningkat. Khusus *Millennials Talk*, acara ini menjadi sarana untuk generasi muda Kementerian PUPR dalam berbagi inovasi dan pengalamannya sebagai pelaku pembangunan,” jelasnya lagi.

Dengan pekerjaan yang banyak tersebut, pembagian tugas di Sekretariat BPIW juga dilakukan dengan melibatkan semua Unit Eselon III. Sedangkan untuk tim di Bagian HKKkompu ditetapkan *Person in Charge* (PIC) untuk masing-masing sub-acara. “PIC ini penting ditetapkan untuk mengawal beberapa hal, seperti *web expo* dan panel pameran, *talk series*, publikasi termasuk iklan, teknis zoom dan *youtube live streaming*, *live chat* di *web expo*, dokumentasi, *press release*, hadiah, hiburan, sosial media, serta teknis acara pembukaan dan penutupan,” ucapnya lagi. Alis sangat memahami, hajatan akbar tersebut

.....
Tidak hanya berkoordinasi dengan rekan-rekan di BPIW, dari mulai persiapan hingga pelaksanaan, Alis dan tim-nya juga berkoordinasi dengan Biro Komunikasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, terutama untuk fasilitasi hosting Web Expo di digitalexpou.pu.go.id.

Konsep secara virtual seperti tahun ini, kami rasakan jauh lebih efektif untuk menarik pengunjung untuk hadir, karena fleksibilitas waktu dan juga aspek simplisitas

membutuhkan tim yang solid. Oleh karenanya ia terus mendorong timnya untuk selalu semangat, kreatif, dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya masing-masing.

“Alhamdulillah semuanya dapat melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang tinggi terhadap BPIW. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua tim dan pihak yang terlibat, sangat bangga dan mengapresiasi kinerja dari tim yang hebat ini,” tutur Alis.

Menjadi hal yang umum dalam sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, kendala teknis dapat terjadi. Demikian halnya dengan persiapan BPIW *Virtual Expo* 2020. Kendala yang dihadapi antara lain durasi waktu *rendering web expo* yang cukup lama dan berat pada saat di awal sebelum *launching*. Namun, kendala tersebut dapat diatasi sebelum pelaksanaan pembukaan BPIW *Virtual Expo* dengan bantuan ahli tenaga IT.

Persoalan teknis lainnya seperti pada *web expo*, yang dapat langsung dapat diperbaiki dalam waktu singkat sehingga BPIW *Virtual Expo* dapat tetap berjalan lancar. “Jadi intinya, dengan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, semua kendala-kendala teknis dapat diatasi dengan cepat,” ujar Alis.

Baginya, kerja keras mewujudkan *Expo* ini tidak hanya dilakukan oleh bagian-bagian di Sekretariat, tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. “Kami sangat apresiasi kepada tim dari Puswil untuk mempersiapkan substansi panel dalam jumlah yang cukup

banyak dengan waktu yang terbatas. Tim dari Vendor juga sangat membantu kami dalam teknis pelaksanaan,” ucapnya.

BPIW *Virtual Expo* terbilang sukses karena jumlah pengunjung *Expo* mencapai sekitar 159 ribu. Tiga *Talk Series* juga berjalan lancar karena selalu dihadiri ratusan orang. Suksesnya *Expo* maupun *Talk Series* tak terlepas dari publikasi dan promosi, sehingga kegiatan BPIW *Virtual Expo* 2020 ini menarik minat banyak orang untuk berpartisipasi.

Alis meyakini, kesuksesan dari BPIW *Virtual Expo* tidak lepas dari arahan dan dukungan dari pimpinan di BPIW dan juga merupakan hasil kekompakan seluruh unit kerja. “Terima kasih untuk arahan dan dukungan dari pimpinan di BPIW yang sudah memberikan amanah dan kepercayaannya kepada kami untuk dapat melaksanakan kegiatan ini,” tuturnya.

Ke depan, ia berharap penyelenggaraan BPIW *Expo* tetap dapat dilaksanakan mengingat *Expo* ini merupakan *event* yang strategis bagi BPIW untuk mempublikasikan hasil-hasil kajian yang disusun, sehingga publik dan khususnya mitra-mitra kerja, terinformasikan akan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan-kawasan strategis.

“Konsep secara virtual seperti tahun ini, kami rasakan jauh lebih efektif untuk menarik pengunjung untuk hadir, karena fleksibilitas waktu dan juga aspek simplisitas. Pengunjung tinggal membuka *link* yang tersedia tanpa harus datang ke lokasi acara,” kata Alis lagi. Selain itu, menurutnya ke depan kegiatan secara virtual ini bisa dikombinasikan dengan pameran secara fisik, meskipun Pandemi COVID-19 sudah selesai.



Pengemban Tugas Dengan Rasa Tanggung Jawab

Tiara Titi Kartika, S.I.Kom, MA

*Penanggung Jawab Teknis BPIW Virtual Expo
Jafung Pranata Humas Subbag Komunikasi Publik
Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
BPIW Kementerian PUPR*

Setelah Alis, “Srikandi BPIW” yang ke-2 yang menjadi bagian dari kesuksesan BPIW *Virtual Expo* adalah Tiara Titi Kartika, S.I.Kom, MA, Jafung Pranata Humas Subbag Komunikasi Publik (Subbag Kompu). Ia merupakan “komandan” untuk urusan masalah teknis. Tanggung jawab itu pun diembannya dengan rasa tanggung jawab. “Kegiatan Expo merupakan salah satu *output* Subbag

Kompu, sehingga otomatis saya terlibat langsung,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Sebagai orang yang baru bergabung di Subbag Kompu, BPIW *Virtual Expo* menjadi tantangan besar bagi Tiara. Namun berbekal latar belakang pendidikan Sarjana Komunikasi dan dukungan tim HKKompu, ia sangat bersyukur kegiatan tersebut berjalan lancar dan sukses.

Tiara yang sehari-hari menangani penerbitan Buletin Sinergi ini memaparkan bahwa ruang lingkup tugasnya terkait teknis pelaksanaan BPIW *Virtual Expo*, mulai dari mempersiapkan rapat dengan pimpinan dan tim internal untuk menghimpun usulan tema expo, berkoordinasi dengan Puswil terkait materi panel, mempersiapkan publikasi expo (menentukan media publikasi, menyiapkan *press release*) dan teknis detail lainnya seperti menyusun SK Kepanitiaan, pemilihan bintang tamu yang akan hadir, berkoordinasi dengan tim pendukung expo seperti Biro Komunikasi Publik, Pusat Data dan Informasi, Biro Umum, protokoler, serta menyiapkan video profil BPIW. “Dari awal, saya dan Bu Alis *side by side* berkoordinasi terkait keseluruhan pelaksanaan expo,” ungkapnya.

Dengan pekerjaan yang cukup banyak tersebut, Tiara dibantu Bagian HKKompu terutama tim Subbag Kompu yang semua stafnya dilibatkan aktif sebagai PIC (total 17 PIC). Tidak hanya itu, Bagian Kepegawaian dan Umum turut andil membantunya dalam hal persiapan sarana dan prasarana mini studio dan pembukaan di auditorium. Staf Puswil juga turut membantu persiapan dan pelaksanaan *Talk Series*. “Kerja sama tim mencerminkan bahwa BPIW

“Kerja sama tim mencerminkan bahwa BPIW merupakan organisasi yang unggul, karena didukung oleh tim internal yang solid dan bertanggungjawab,” ucap Tiara.



Suasana persiapan Talk Series 2

“Saya sangat senang dan berterima kasih kepada pimpinan BPIW karena telah diberikan kesempatan turut andil dalam penyelenggaraan BPIW Virtual Expo,” ujar Tiara.

merupakan organisasi yang unggul, karena didukung oleh tim internal yang solid dan bertanggungjawab,” ucap Tiara.

Waktu persiapan yang pendek juga menjadi tantangan tersendiri baginya. Tiara dan tim HKKompu serta tim EO bekerja keras dan lebih teliti dengan harapan dapat meminimalisir risiko. “Kami simulasi dan kalkulasi seluruh rangkaian kegiatan, dan kami siapkan *back up plan* jika ketika pelaksanaan tidak dapat dijalankan sesuai agenda awal,” ungkap Tiara.

Tantangan lain yang dihadapi adalah *element of surprise* yang muncul selama pelaksanaan. Masalah ini menurutnya dapat diatasi dengan tim handal yang *stand by* pada pelaksanaan expo, khususnya ketika *opening* dan *Talk Series 1* di auditorium, *Talk Series 2* dan *3* di mini studio.

Tiara juga memaparkan bahwa dengan pilihan expo melalui virtual, tentunya berkaitan dengan teknis virtual yang dilakukan dengan sistem *rendering*, dimana materi panel dan video akan di-*render* dalam satu sistem. Oleh karena proses *rendering* cukup memakan waktu, yakni sekitar

1-2 pekan, maka koordinasi dengan Puswil terkait penyiapan materi panel dan video dilakukan diawal agar cukup waktu untuk penyiapan materi yang berkualitas atau layak tayang.

“Setiap materi yang dikirimkan teman-teman di Puswil kami cek keseluruhan tampilan, dari sisi warna, porsi materi-gambar-peta, substansi, dan *tagging* lokasi di peta apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian poin-poin yang harus diperbaiki, kami sampaikan ke Puswil untuk direvisi. Seluruh panel berjumlah 66 panel dan 16 video yang terbagi dalam enam tema tematik,” ujar Tiara.

Hal lain yang tak kalah rumit adalah mempersiapkan tiga *Talk Series*, terkait hal itu, Tiara dibantu PIC dari Puswil, Puswil I merupakan PIC *Talk Series 1*, Puswil III PIC *Talk Series 2*, dan Bagian Kepegawaian dan Umum PIC *Talk Series 3/Millennials Talk*. PIC tersebut menyiapkan narasumber dan moderator. Sedangkan tim HKKompu menyiapkan teknis pelaksanaan di mini studio seperti, MC, *cue card* MC, tim yang *stand by* untuk *handle* zoom, prompter, paparan yang akan ditayangkan, dan

kebutuhan lainnya.

Tidak sampai disitu, ia juga harus mempersiapkan pembukaan BPIW *Virtual Expo*, Tiara dan tim, menyiapkan dua skenario sesuai arahan Kepala BPIW Hadi Sucahyono. Skenario pertama, pembukaan dilakukan *live virtual*. Sedangkan skenario yang kedua adalah pembukaan dilakukan *live* di auditorium. "Jadi ketika *injury time* diputuskan pembukaan BPIW *Virtual Expo* 2020 dilakukan *live* di auditorium, kami sudah siap secara *planning*," ungkapnya.

Guna menyempurnakan pelaksanaan di lapangan, dilakukan gladi resik pada H-1 di Auditorium Kementerian PUPR. Gladi resik dipimpin Kepala BPIW untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat (tim EO, PIC BPIW Expo, MC, petugas protokoler, pembaca doa, wartawan, dan lain sebagainya, sudah siap dan tahu perannya masing-masing.

Dilain sisi, sudah menjadi hal yang lumrah pada sebuah acara besar di sebuah instansi, banyak arahan yang diberikan pimpinan. Semua arahan pimpinan tersebut diterima Tiara dengan baik, karena baginya arahan pimpinan merupakan *guidance* bagi tim dalam mencapai suksesnya penyelenggaraan expo. "Saya sangat senang dan berterima kasih kepada pimpinan BPIW karena telah diberikan kesempatan turut andil dalam penyelenggaraan BPIW *Virtual Expo*," ujar Tiara.

Ia pun menyatakan kesiapannya menjalankan apapun arahan pimpinan terkait pelaksanaan BPIW Expo di masa datang. "Saya mengikuti arahan pimpinan, apakah ke depan BPIW dilaksanakan secara virtual atau tidak. Saya siap melaksanakan tugas yang diberikan," tegasnya.



Mengawal Millenials Talk, Menjadi Tantangan yang Menarik

Rikawati, ST, MT

*Penanggung Jawab Millennials Talk
Subkor Pengembangan Pegawai
Bagian Kepegawaian dan Umum
BPIW Kementerian PUPR*

Dalam penyelenggaraan BPIW *Virtual Expo* ini digelar tiga *Talk Series*. Salah satunya yang menarik adalah *Millennials Talk*. Disini kaum milenial diberi ruang untuk berbicara mengenai inovasi yang dilakukan, sesuai bidangnya masing-masing. "Srikandi BPIW" yang ke-3 yang mengawal urusan tersebut adalah Rika. Bagi Rika, amanah tersebut merupakan kepercayaan besar yang pernah diembannya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Kepala BPIW, Bapak Hadi Sucahyono

Tiara dan tim, menyiapkan dua skenario sesuai arahan Kepala BPIW Hadi Sucahyono. Skenario pertama, pembukaan dilakukan *live virtual*. Sedangkan skenario yang kedua adalah pembukaan dilakukan *live* di auditorium.

Millennials Talk merupakan suatu ajang untuk berdiskusi hangat antar para milenial yang dianggap mampu menginspirasi rekan-rekan milenial dalam melihat sisi positif dari pekerjaan yang dilakukan.

dan Sekretaris BPIW, Bapak Iwan Nurwanto, yang memberikan kepercayaan sangat besar kepada saya untuk menjadi penanggung jawab *Millennials Talk*,” ujar Rika kepada “Sinergi” beberapa waktu lalu. Baginya talkshow tersebut dapat menjadi jembatan penghubung antara pemikiran ide, opini, dan gaya berkomunikasi generasi muda milenial dengan para koleganya.

Menurut Rika, *Millennials Talk* merupakan suatu ajang untuk berdiskusi hangat antar para milenial yang dianggap mampu menginspirasi rekan-rekan milenial dalam melihat sisi positif dari pekerjaan yang dilakukan. “Hal-hal kecil dan yang dianggap remeh dari pekerjaan kita, mungkin dapat memberikan suatu perubahan berarti untuk orang lain”, ucap Rika.

Sedangkan goal yang diharapkan dari pelaksanaan *Millennials Talk* adalah memberikan wadah bagi kaum muda *millennials* PUPR untuk menuangkan ide gagasan dan pemikiran serta memancing untuk berpikir inovatif. Termasuk juga untuk mendapatkan inspirasi dari para *millennials* lainnya dalam melakukan pekerjaan. Dalam pandangan Rika, sekecil apapun pekerjaan yang dilakukan, jika dilakukan sepenuh hati dan keikhlasan tentunya dapat membawa manfaat. Selain itu, pengalaman yang dibagikan dapat menjadi inspirasi untuk selalu mau berinovasi dalam mengemban tugas serta pantang menyerah dalam menghadapi kendala.

Mempersiapkan sebuah *talkshow* dengan jumlah narasumber lebih dari lima orang menjadi tantangan tersendiri bagi Rika. Namun ia tak kehilangan ide untuk mencari narasumber yang pas untuk *Talk Series* penutup tersebut.

Dijelaskannya bahwa narasumber *Talk Series* ke-3 ini merupakan

gabungan antara *millennials* PUPR dan swasta dengan proses pencarian dan *screening* dari kandidat-kandidat yang diharapkan mampu membawa inspirasi kaum muda PUPR. “Mencari anak muda dengan pemikiran kreatif yang dapat memberikan inspirasi dengan inovasinya yang sejalan dengan konteks pendekatan pengembangan wilayah merupakan tantangan tersendiri yang tidak mudah tapi Alhamdulillah, saya dibantu dengan tim yang sangat solid dan suportif,” ucap Rika.

Waktu yang mendesak dan banyaknya kandidat yang dipertimbangkan oleh unit organisasi merupakan kendala yang harus dihadapinya. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, bagi Rika, membutuhkan pemikiran yang cepat dan strategis dalam pemilihan narasumber dan urutan penyajian agar materinya dapat tersaji dan menjadi satu kesatuan materi yang menarik.

Pada akhirnya, kendala itu pun dapat diatasi dengan baik, dan ia berhasil menghimpun delapan narasumber dari beberapa unit organisasi termasuk BPIW. Generasi muda BPIW diwakili Aji Noor Muhammad dan Akhyar Farizal. Jalannya *Millennials Talk* ternyata dapat menginspirasi generasi muda Kementerian PUPR, seperti pengalaman Eki Arsita Rizki dari Direktorat Cipta Karya yang harus bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang sudah dianggap *injury time* atau di menit-menit terakhir. Pembangunan infrastruktur menurutnya perlu dilakukan secara cepat dan tepat dengan kualitas yang mumpuni meski di saat *injury time*.

Pengalaman dari Arif Dhiaksa dari Ditjen Sumber Daya Air menurut Rika juga cukup menginspirasi, karena yang bersangkutan



Suasana acara Talk Series 3

melakukan kajian pengolahan air rawa di desa terpencil yakni Desa Jangkit Timur Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengoptimalkan penggunaan gawai sederhana untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih.

“Generasi Muda PUPR perlu mendapatkan inspirasi dari para kolega yang lebih berpengalaman untuk dapat meyakini manfaat dari hal yang dilakukan sekecil apapun. *Action speaks louder*, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Pelajaran lain yang didapat adalah kita tidak perlu mencemaskan hasil dari pekerjaan, asalkan dilakukan dengan prinsip melayani,” tegas Rika.

Pelajaran lain yang didapat dari *Talk Series* ini menurutnya adalah rencana hal yang sangat sulit di atas kertas dapat diwujudkan oleh *millenial* PUPR dalam membangun infrastruktur, seperti pembangunan beberapa venue Asian Games 2018 Jaka Baring Palembang, tepat waktu.

Tidak hanya generasi muda di lingkungan Kementerian PUPR. *Talk Series* ke-3 ini menghadirkan pemuda pengelola bisnis ojek online yang menduduki *Unicorn* ke-5 di tanah air, yakni Rizky Ardian Hidayat. Bagi Rika, Rizky banyak membagikan pengalamannya bahwa ketika bekerja di tempat yang berbeda, kemampuan adaptasi yang baik diperlukan

untuk dapat selaras dengan tujuan organisasi.

“Ketika menghadapi permasalahan dan kendala fokuslah terhadap solusi yang ingin diwujudkan terlepas dari banyaknya *distraction* yang muncul. Selain itu, dapat dikatakan sebenarnya membangun infrastruktur dengan membangun sebuah *start up* tidak jauh berbeda, esensinya kita sama-sama menjadi *creator*. Bedanya, infrastruktur adalah sebuah teknologi yang menjadi pilar pendukung bagi peradaban,” ungkap Rika.

Ia pun berbagi pandangannya mengenai generasi muda. Menurut Rika, satu dari empat pegawai PUPR adalah generasi muda, dan banyak dari mereka sudah terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga sudah seharusnya pemikiran generasi muda dapat diperkaya dengan adanya diskusi yang kreatif dan inovatif untuk mendapatkan solusi membangun negeri.

Baginya, *Critical thinking*, empati dan kolaborasi merupakan basis pemikiran yang diperlukan untuk membangun kebiasaan berinovasi. “Akhir kata, ASN muda harus bisa bersahabat dengan tantangan dan masalah, karena dengan dua hal tersebut maka keahlian dan kemampuan akan semakin terasah,” tukasnya. **(Hendra Djamal)**

Critical thinking, empati dan kolaborasi merupakan basis pemikiran yang diperlukan untuk membangun kebiasaan berinovasi.

Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah sebagai Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional

Barkah Wibowo, ST



Dalam 5 visi Presiden untuk Indonesia 2019-2024, diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global. Salah satu visi tersebut yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur melalui interkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Sumber: Istimewa

Pandemi Covid-19 memberi dampak cepat dan luas di berbagai aspek. Kementerian Keuangan melaporkan pandemi memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Berdasarkan arahan presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020 di Istana Presiden, menginstruksikan salah satunya terkait pengembangan *Food Estate* dalam mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi tersebut.

Disamping itu *Food Estate* juga dipersiapkan untuk mengantisipasi ancaman musim kemarau dan restriksi ekspor pangan global. Dalam Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, program peningkatan penyediaan pangan nasional (*Food Estate*) masuk dalam daftar program strategis nasional.

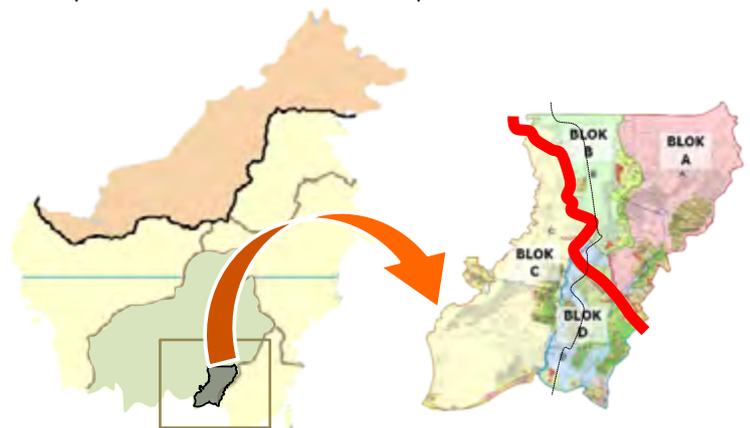
Pengembangan kawasan *Food Estate* juga sebagai bagian dari kedaulatan negara dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, direncanakan pembangunan dan pengembangan kawasan "*Food Estate*" yang berlokasi di 5 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua. Adapun Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi langkah awal provinsi yang akan dikembangkan *Food Estate*.

Food Estate merupakan program jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan secara nasional. Pengembangan kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah diarahkan untuk membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Hadirnya pembangunan kawasan *Food Estate*, juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Target pengembangan kawasan *Food Estate* di lahan rawa Kalimantan Tengah pada tahun 2020 seluas 30.000 ha dengan komoditas utama adalah padi dan jagung, sedangkan komoditas lain seperti hortikultura (sayuran/buah buahan), peternakan (itik), dan perkebunan adalah sebagai pendukung. Program dan kegiatan *Food Estate* tahun 2020 terdiri dari:

- Penataan kawasan dan pengembangan prasarana dan sarana (tata air, alat mesin budidaya tanaman (alsintan) pra dan pasca panen);
- Peningkatan kapasitas dan diversifikasi produksi (pengembangan teknologi produksi, pengadaan sapras);
- Pengembangan SDM dan korporasi petani (peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha, pengembangan korporasi petani).

Jika dilihat dari PDRB sektoral di Provinsi Kalimantan Tengah, PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tercatat pada tahun 2019, PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan



No.	LOKASI	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)			Sisa Luas Potensial Peningkatan (Ha)
			Daerah Irigasi Baik	Rehabilitasi Daerah Irigasi	Total	
I	BLOK A	43.503	4.873	17.257	22.130	21.374
II	BLOK B	11.543	-	3.580	3.580	7.963
III	BLOK C	33.724	3.567	16.354	19.921	13.803
IV	BLOK D	76.092	19.873	19.974	39.846	36.245
TOTAL		164.862	28.313	57.164	85.477	79.385



Food Estate di Desa Belanti (Sumber: Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C)

mencapai angka Rp 21 Miliar. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden RI bahwa Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai kawasan *Food Estate*. Di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut nantinya akan dibagi menjadi 4 blok, mulai dari Blok A hingga Blok D yang terletak di dalam 2 kabupaten yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Perkiraan penyerapan tenaga kerja tahun 2021 untuk *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 1.870 orang untuk Kabupaten Kapuas dan 1.500 orang untuk Kabupaten Pulang Pisau. Desa Belanti menjadi salah satu *pilot*

project dalam pengembangan *Food Estate* yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau.

Konsep pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah menggunakan pendekatan hulu-hilir yang diarahkan untuk membangun sistem produksi pangan pertanian modern dan berkelanjutan. Setiap petani terkonsolidasi dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani, yang mengusahakan budidaya pertanian sebagai anggota koperasi yang bekerjasama dengan BUMN dan BUMDes membentuk korporasi petani. Korporasi petani tersebut dapat



Pelabuhan Bahaur (Sumber: Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C)



Pelabuhan Batanjung (Sumber: Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C)



Akses Jalan Menuju Desa Belanti (Sumber: Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C)



Saluran Irigasi di Desa Belanti (Sumber: Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C)

menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk memasarkan hasil produksinya.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2020 Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 221,98 miliar untuk *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp. 172,87 miliar (78%) dialokasikan untuk prasarana dan sarana pertanian. Disamping itu, sangat diperlukan adanya keterpaduan antar K/L dalam mendukung pengembangan *Food Estate* tersebut.

Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR berperan penting dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi, mengingat akses menuju kawasan pengembangan *Food Estate* serta jaringan irigasi yang mayoritas masih buruk. Pada tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Bina Marga sudah mulai menangani akses pendukung pengembangan *Food Estate* sepanjang 70 km. Sementara itu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tahun 2021, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun untuk

kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi eksisting di lahan eks PLG tersebut dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022.

Dengan terbangunnya infrastruktur PUPR yang mendukung pengembangan *Food Estate* tersebut, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi tanaman pangan mengingat saat ini rata-rata biaya produksi beras di Indonesia sebesar Rp 11.000/kg lebih besar dibanding Vietnam yang memiliki rata-rata biaya produksi hanya sebesar Rp 6.000/kg. Disamping itu pembangunan infrastruktur jaringan jalan nantinya juga diharapkan dapat menghubungkan kawasan *Food Estate* dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada disekitarnya untuk efisiensi dan optimalisasi proses distribusi dan produksi. Kedepan, kawasan pengembangan *Food Estate* dapat terhubung dengan Pelabuhan Batanjung dan Pelabuhan Bahaur dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.

Peran Ahli dalam Pembangunan Infrastruktur



Daerah Irigasi Komering Sumsel

Sumber: PUPR

Pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas bagi Indonesia, terlebih sejak kepemimpinan Preside Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga saat ini. Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang mendapat tugas besar tersebut. Anggaran yang dikucurkan dari tahun ke tahun berjumlah ratusan triliun untuk dapat memenuhi target pembangunan. Tujuan dari pembangunan infrastruktur yang masif ini tidak lain adalah untuk pemerataan pembangunan, membangun konektivitas, sehingga Indonesia diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

Target pembangunan infrastruktur PUPR yang dicanangkan untuk periode 2015-2019 meliputi empat sektor. Pertama konektivitas, yaitu pembangunan 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan baru, dan 30 km jembatan baru. Kedua, sektor perumahan ditargetkan pembangunan sejuta rumah. Ketiga, sektor ketahanan air dan pangan ditargetkan pembangunan 65 bendungan, dan 1 juta hektar jaringan irigasi baru. Keempat, untuk infrastruktur permukiman dicanangkan program 100% akses air minum layak, 0 hektar kawasan kumuh perkotaan, dan 100% akses sanitasi layak.

Tahun 2021 Kementerian PUPR telah mendapat pagu APBN sebesar 149,8 triliun. Jumlah tersebut adalah yang terbesar dibanding seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menuntaskan target pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan di atas. Kompas.com menyebutkan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk program sumber daya air Rp 58,55 triliun, untuk pembangunan 47 bendungan, pembangunan 50.000 hektar lahan

irigasi baru, 120 km pengendali banjir, rehabilitasi pengamanan pantai, peningkatan 250.000 hektar lahan irigasi, dan revitalisasi 5 danau prioritas.

Selanjutnya, anggaran juga akan dialokasikan untuk pembangunan 2 bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 53,96 triliun, di antaranya 831 km jalan, 19.000 meter jembatan, 3.100 meter *fly over underpass* dan terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279 km jalan nasional, serta 2.171 meter penggantian jembatan.

Sementara di bidang perumahan, dialokasikan Rp 8,09 triliun dengan pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, serta 111.000 unit rumah swadaya dan peningkatan rumah tidak layak huni.

Pembangunan Masif VS Optimalisasi Pemanfaatan

Begitu besarnya anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur PUPR selama 6 tahun ini. Tugas untuk membangun memang luar biasa berat, namun yang lebih berat adalah memastikan bahwa apa yang dibangun bermanfaat dan mampu meningkatkan taraf hidup

.....
Tahun 2021 Kementerian PUPR telah mendapat pagu APBN sebesar 149,8 triliun. Jumlah tersebut adalah yang terbesar dibanding seluruh Kementerian dan Lembaga

Optimalisasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan harus dilakukan, dan hal itu tidak bisa lepas dari peran para ahli. Ahli sangat dibutuhkan sejak proses pembangunan untuk menghasilkan infrastruktur yang kuat dan tangguh bencana

Pembangunan perumahan rakyat

masyarakat. Efektivitas pembangunan salah satunya terlihat ketika hasil-hasil pembangunan membawa dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat. Misalnya, manfaat pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat terlihat pada kawasan Indonesia Timur. Potensi Indonesia Timur sangat besar pada sektor pangan dan pariwisata.

Namun sayangnya 13 provinsi di Indonesia Timur yang terletak di kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih termasuk wilayah yang miskin secara ekonomi.

Oleh karena itu Presiden Joko Widodo mencanangkan program Membangun Dari Pinggiran, yakni pembangunan infrastruktur dari wilayah-wilayah perbatasan, dan juga wilayah miskin di Indonesia Timur. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan mengurangi

kesenjangan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Namun pembangunan yang telah selesai perlu terus dikawal pemanfaatannya. Jangan sampai infrastruktur yang telah dibangun negara justru dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan negara.

Misalnya jangan sampai jalan trans papua yang telah dibangun dijadikan rute pengangkutan *illegal logging*, pembangunan kawasan perbatasan jangan sampai hanya menguntungkan negara lain, pembangunan kawasan pariwisata jangan sampai hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk keuntungan dari bisnis pariwisata.

Peran Ahli dalam Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur

Optimalisasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan harus dilakukan, dan hal itu tidak bisa lepas dari peran para ahli. Ahli sangat dibutuhkan



Sumber: Istimewa

sejak proses pembangunan untuk menghasilkan infrastruktur yang kuat dan tangguh bencana, hingga proses pemanfaatan infrastruktur itu sendiri oleh masyarakat.

Ahli Teknik Tanah misalnya, sangat dibutuhkan untuk tahap pembuatan pondasi berbagai bangunan infrastruktur. Menteri PUPR melalui antaranews.com 11 November lalu mengatakan bahwa beliau menginginkan para ahli teknik tanah dan geoteknik yang tergabung dalam Himpunan Ahli teknik Tanah Indonesia (HATTI) terus meningkatkan kontribusinya dalam perencanaan, utamanya terkait fondasi untuk menjamin ketahanan infrastruktur. Hal ini penting karena beberapa wilayah di Indonesia berpotensi mengalami longsor, *subsidence*, bahkan likuifaksi tanah.

Para ahli geologi juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur. Data-data geologi dan masukan dari

ahli geologi sangat diperlukan pada tahap perencanaan. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, menyampaikan bahwa dalam mewujudkan infrastruktur tangguh bencana dibutuhkan kajian mendalam, salah satunya analisa daya dukung lingkungan yang bersumber dari data dan ahli geologi (antaranews.com 22 November 2020).

Masukan para ahli juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan dalam tahap-tahap perencanaan. Proses studi kelayakan (*preliminary study*) perlu melibatkan berbagai aspek keilmuan termasuk bidang antropologi sosial. Ahli antropologi yang mengetahui seluk beluk masyarakat sekitar, budayanya, dan hingga kebutuhan yang mereka perlukan. Dengan adanya kajian yang holistik pada tahap perencanaan ini, maka pembangunan infrastruktur didasari oleh kebutuhan sehingga nantinya tepat guna pula pemanfaatannya.

(Mutri Batul Aini)

Menteri PUPR melalui antaranews.com 11 November lalu mengatakan bahwa beliau menginginkan para ahli teknik tanah dan geoteknik yang tergabung dalam Himpunan Ahli teknik Tanah Indonesia (HATTI) terus meningkatkan kontribusinya dalam perencanaan utamanya terkait fondasi untuk menjamin ketahanan infrastruktur.

SAAT MILENIAL DICAP BOROS GENERASI MUDA BPIW GELAR WEBINAR BIJAK FINANSIAL



Milennial atau generasi muda yang selama ini dicap boros, komplek dan tidak pernah bisa punya tabungan. Hal tersebut bisa jadi nyata dalam kehidupan sebagian besar milenial. Pasalnya, mereka banyak yang terjebak gaya hidup konsumtif seperti *shopping* di mall, *shopping online*, nongkrong di kafe, jajan kopi dan boba kekinian dan lainnya. Generasi muda BPIW pun terpanggil membuat seminar dan mengedukasi kaum generasi muda agar lebih bijak dalam mengelola finansial.

Kaum milenial menjadi salah satu pendorong arah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu karena populasi milenial Indonesia diperkirakan mencapai 34 persen.

“Untuk itu milenial atau generasi muda BPIW perlu memiliki sikap bijak dalam berbagai hal, salah satunya dalam perencanaan mengelola keuangan pribadi,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka webinar “Resolusi ASN Muda Bijak Merencanakan Finansial” di Jakarta, Senin, 21 Desember 2020. Webinar tersebut menghadirkan narasumber *Finansial Planer*, Widya Yuliarti dan *Head of Advisor Finansialku*, Robby Christy.

Hadi berharap, webinar yang digelar ini dapat memberikan pencerahan pada generasi muda dalam perencanaan keuangan, sehingga dapat lebih bijak dalam pengelolaan keuangan ke depannya.

Lebih lanjut, Hadi mengaku, jajaran pimpinan senantiasa mendorong generasi muda BPIW rutin melakukan kegiatan-kegiatan edukasi untuk generasi muda. “Bila saat ini webinarnya mengenai perencanaan keuangan, kedepannya bisa dicarikan tema-tema edukasi yang lainnya lagi,” terang Hadi.

Sementara itu, Widya Yuliarti memaparkan, dalam mengelola keuangan harus memastikan mampu memenuhi semua kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, dan jika ada sewa. Selain itu, kalangan milenial

juga harus memiliki asuransi kesehatan. “Harapannya agar bisa menolong kondisi keuangan saat mendadak harus dirawat di rumah sakit,” ujar Widya.

Bila sudah memenuhi kriteria tersebut, lanjutnya, bisa mulai melakukan investasi untuk bebas finansial. Menurutnya, langkah awalnya menabung. “Hal utama yang harus dilakukan bila ingin bebas finansial adalah giat menabung. Agar dana tabungan tidak tergerus untuk biaya lain-lain, bisa buka rekening khusus untuk tabungan,” terangnya.

Ia menambahkan, bagi seseorang yang belum menikah bisa menyisihkan sampai 50 persen dari gaji. Apalagi tidak mempunyai tanggungan yang wajib dibayar setiap bulannya. Sedangkan, untuk yang sudah berkeluarga atau memiliki tanggungan sebaiknya menabung sesuai kemampuan. “Idealnya anggaran minimal tabungan sekitar 10 persen dari gaji,” terangnya.

Widya mengingatkan dana tabungan tersebut sebaiknya ditujukan untuk memenuhi dana darurat. Idealnya setiap orang memiliki dana darurat sekitar tiga sampai enam bulan dari total pengeluaran. “Dana darurat tersebut bisa membantu menjaga kondisi keuangan saat krisis,” kata Widya. Saat dana darurat sudah terpenuhi, dapat dilanjutkan mulai menabung untuk mengumpulkan modal membeli aset aktif atau modal untuk investasi.

Kemudian, membeli aset-aset aktif. Ia mengatakan, seperti membeli satu unit properti untuk dikontrakkan atau dibuat

.....
Hadi berharap, webinar yang digelar ini dapat memberikan pencerahan pada generasi muda dalam perencanaan keuangan, sehingga dapat lebih bijak dalam pengelolaan keuangan ke depannya.

Untuk mengelola keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. "Saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk menyusun anggaran,"



Pelaksanaan webinar "Resolusi ASN Muda Bijak Merencanakan Finansial"

kost. Opsi lainnya, menginvestasikan sebagian dana tabungan ke dalam reksadana, emas, atau lainnya.

Widya juga mengatakan, hal yang wajib secara disiplin dilakukan adalah mengontrol gaya hidup. Salah satunya tidak menaikkan gaya hidup saat nilai pendapatan naik. Sebab, gaya hidup akan menghabiskan gaji atau pendapatan untuk memenuhinya. "Sebaiknya Anda tetap hidup sederhana," kata Widya.

Untuk mengontrol pengeluaran, bisa dengan membuat anggaran bulanan yang di dalamnya memuat biaya makanan, transportasi, *entertainment*, dan utang bila ada. "Jangan lupa juga untuk mencatat pengeluaran secara rutin. Catatan tersebut bisa memudahkan mengontrol pengeluaran," terangnya.

Pada acara yang sama, Robby Christy mengatakan, sebenarnya era digital ini sangat mudah mengeksplorasi sumber pendapatan. "Misal *youtuber*, mereka membuat konten dan bisa dapat uang dari dunia maya. Lalu *vlogger* juga, mereka melakukan hobi dan mereka dibayar," ungkap Robby. Ia menambahkan, saat merasa memerlukan sumber pendapatan tambahan jangan kehabisan akal untuk memutar otak, sebab saat ini uang bisa datang dari mana saja.

Robby juga mengatakan, dalam mengelola pendapatan banyak orang menerapkan

pos-pos anggaran dengan menentukan persentase tertentu untuk kebutuhan-kebutuhannya. "Sebenarnya penetapan pos anggaran beserta besarnya akan sangat relatif, bergantung pada tujuan finansial dan kondisi saat ini," terangnya.

Ia menerangkan, milenial yang belum berkeluarga bisa lebih memprioritaskan tabungan, atau investasi, sedangkan yang sudah berkeluarga memiliki prioritas lain seperti pendidikan anak. Menurutnya, untuk mengelola keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. "Saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk menyusun anggaran," jelasnya.

Hal yang perlu dilakukan adalah memproteksi pendapatan. Robby mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan kondisi keuangan seseorang terancam, yakni sakit dan meninggal dunia. Keduanya menyebabkan sumber pendapatan tersendat adapun pengeluaran selalu ada.

Menurutnya, proteksi pendapatan yang bisa dilakukan adalah dengan memiliki produk asuransi. "Tapi banyak orang yang salah persepsi mengenai konsepsi asuransi dan menganggap produk ini hanya bicara soal risiko sakit dan kematian. Padahal, pada dasarnya asuransi adalah cara untuk memproteksi uang atau pendapatan," terangnya. **(Daris)**

Dimensi Urbanisasi dan Desentralisasi dalam Pengembangan Wilayah



Judul Buku :

Pengembangan Wilayah dan Kota di Indonesia: Dimensi Urbanisasi dan Desentralisasi

Penulis : **Tommy Firman**

Penerbit : **ITB Press**

Tahun Terbit : 2020 • Halaman : 149 • ISBN : **9786232970052**

Pengembangan Wilayah dan Kota bersifat kompleks dan melibatkan banyak disiplin ilmu pengetahuan. Penulisan buku ini juga melihat PWK dalam konteks yang lebih luas tidak semata-mata sebagai pengembangan tata ruang wilayah dan kota. Bahasan pada buku ini terfokus pada kaitan PWK dan desentralisasi dan urbanisasi di Indonesia.

Buku ini adalah kumpulan (antologi) Sebagian karya terpilih penulis pasca pencapaian Guru Besar ITB sejak 1998-2018. Artikel-artikel ini telah mengalami proses *review* oleh pakar (*peer-reviewed articles*) pada berbagai jurnal internasional.

Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama (Bab 2-bab 4) membahas pengembangan wilayah kota dikaitkan dengan urbanisasi, sedangkan bagian kedua (Bab 5-bab 7) dikaitkan dengan desentralisasi. Bagian pertama buku ini terdiri atas tiga artikel yang mengulas urbanisasi dalam arti luas. Artikel pertama

membahas mengenai pembangunan perkotaan di Indonesia sejak masa ledakan ekonomi pada era orde baru hingga awal reformasi, termasuk pada saat puncak krisis ekonomi tahun 1987 sampai dengan 1989.

Artikel kedua pada bagian pertama membahas aspek pengembangan lahan di perkotaan di Indonesia pada dimensi teoretis. Lebih spesifik, artikel ini mengupas bagaimana pengembangan lahan perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang, masalah dan praktek pengembangan lahan perkotaan di Indonesia di era 2000-2010.

Artikel ketiga pada bagian pertama mengupas secara khusus mengenai Mega-Urbanisasi di Indonesia, yang merupakan objek riset penulis sejak 1990 hingga saat ini. Bagaimana perkembangan wilayah perkotaan yang membentang dari Jabodetabek hingga Bandung Raya dari segi sosial-ekonomi dan fisik, serta bandingannya yang terjadi di beberapa negara Asia.

Bagian kedua buku ini dipusatkan pada konsekuensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada pengembangan wilayah dan kota di Indonesia. Analisis pada artikel-artikel di dalamnya cukup terkini sebagai isu pengembangan wilayah kota yang belum banyak dibahas. Artikel pertama dalam bagian kedua ini menyoroti kaitan pemekaran administratif daerah (*Territorial Splits*) dengan dampaknya pada pengembangan wilayah dan kota.

Artikel kedua membahas mengenai kebutuhan akan model institusi tata Kelola untuk wilayah Metropolitan Jabodetabek, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi baru di Indonesia. Sementara artikel ketiga, berfokus pada hal yang sama namun dengan fokus pada kerjasama antar Pemerintah Daerah di wilayah Yogyakarta, yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Kartamantul). Semua artikel pada bagian ini sangat relevan dengan isu pengembangan perkotaan di Indonesia pada dewasa ini. Pada dekade 2020 ini pembangunan kelembagaan dan perkotaan pada dasarnya harus bersifat lintas wilayah administratif kewenangan Pemerintah Kota dan kabupaten.

(Mutri Batul Aini)

Pelajaran Berharga Menuntut Ilmu di Jepang, Dimarahi Hingga Dapat Dua Penghargaan

Zhein Adhi Mahendra Setiawan S.E, M.Sc.

Karya Siswa Sekretariat BPIW Kementerian PUPR

Meraih gelar pendidikan bisa dua gelar sekaligus atau biasa disebut *double degree*. Hal ini juga yang dijalani salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIW Kementerian PUPR, Zhein Adhi Mahendra Setiawan, S.E, M.Sc. Pria kelahiran Bandung, 26 Juli 1984 ini meraih gelar *Master of Science* atau M.Sc di Hiroshima University di Jepang. Bila nanti di wisuda (saat rubrik Sosok ini dibuat Zhein belum di wisuda, *red*), maka ia akan mendapat gelar M.S.E atau Magister Sains Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI).



“Kalau di UI mulai kuliahnya Agustus 2018. Sedangkan di Hiroshima University, berangkatnya dari September 2019. Selama setahun S2 di UI saya belajar ilmu ekonomi dan di Hiroshima University saya belajar mengenai kebijakan publik atau *policy development*,” tutur lulusan S1 bidang ekonomi di

Universitas Padjadjaran Bandung itu, saat dibicangi “Sinergi” beberapa waktu lalu.

Ia memilih S2 ilmu ekonomi, karena sama dengan pendidikan S1 nya. Alasan lain adalah Zhein beranggapan, bila menajamkan ekonometrik, maka akan membuat data-data asumsi ekonomi yang ia dapat di BPIW menjadi berguna. Sedangkan *policy development* ia pilih, karena ada ketertarikan atas paparan dari *sensei* atau dosen dari Hiroshima University yang datang ke Indonesia dan memperkenalkan diri sebagai ahli ekonomi transportasi.

Melalui jalur karya siswa yang diadakan Kementerian PPN/Bappenas ini, ia dan tiga ASN lainnya dari BPIW mengikuti tes penerimaan. Setelah lulus, ia belajar bahasa Inggris selama enam bulan. Usai menyelesaikan pendidikan dua semester di UI, Zhein mengikuti *training* Bahasa Jepang.

Dengan *double degree* ini ia mendapat membandingkan S2 di Indonesia dan Jepang. “Kalau di UI bagi saya sangat berat, karena diajari rumus yang susah dan metodenya sulit. Mungkin karena otak saya yang kurang,” ujarnya sambil tertawa. Di Jepang, *sensei* pembimbingnya memberikan pelatihan intuisi ilmu ekonometrik. Dengan intuisi ini mempelajari dibalik rumus yang ada pada literatur jurnal dan mengapa menghitungnya seperti itu.

Tidak tanggung-tanggung, selama sebulan ia berlatih intuisi. Seminggu dua kali ia ke kampus, sore hingga malam hanya membahas intuisi ekonometrik tersebut. Saat ia menginjakkan kaki di Jepang untuk pertama kalinya, cuaca di negara tersebut menyenangkan buatnya, karena kala itu sedang musim gugur, udaranya dingin dan sejuk. Tidak hanya itu, Zhein juga tertarik dengan ramahnya sikap masyarakat sekitar. Ia pun mudah beradaptasi, apalagi tempat ia tinggal, yakni apato atau rumah susun, semuanya dihuni orang Indonesia. “Rumah susunnya disebut *Chizuru Kopo* atau Seribu Bangau. Oleh orang-orang Indonesia yang ada disitu disebut “Cijeruk”, sangat Indonesia sekali,” ucapnya sambil tertawa.

Namun yang lebih menyenangkan baginya adalah istri dan anaknya dapat ikut tinggal di Jepang. Kehadiran keluarga sangat memberi dorongan semangat tersendiri bagi Zhein untuk menyelesaikan pendidikannya. Ia pun tidak bekerja sampingan, karena dana yang didapat dari beasiswa itu juga sangat mencukupi. Diawal-awal kedatangan keluarganya itu, Zhein pun mendapat tugas baru, yakni menemani mereka, misalnya pergi berbelanja dan sedikit memberi pelajaran bahasa Jepang agar mudah berkomunikasi.

Mata kuliah yang ia dapat, ternyata tidak sama dengan pekerjaannya di BPIW yakni tentang penyusunan program jangka pendek. Oleh karenanya ia harus belajar ilmu baru seperti intuisi tersebut. Namun karena baru mengenal, maka di mata *senseinya*, yakni Prof. Yoshida Yuichiro, Zhein dianggap belum memahaminya. Alhasil, ia pun dimarahi dosennya itu di ruang kelas di kampusnya. Tak tanggung-tanggung, Zhein harus menerima amarah sang profesor dengan bahasa Inggris selama tiga jam!.

“Beliau memarahi saya dengan pintu kelas terbuka, karena memang ia selalu membuka pintunya. Jadi setiap orang yang lewat, mendengar teriakan beliau. Jadi malu sekali.. hahaha. Tapi aku merasa tidak bersalah,” ucap Zhein sambil tertawa mengingat-ingat momen tersebut. Meski dimarahi cukup lama, namun tidak membuat mentalnya jatuh, karena bagi Zhein hal itu sudah biasa dijalani. “Karena kan kalau orang PUPR itu sering dimarahi, jadi sudah biasa.. haha... Bagi saya, *sensei* marah, karena ingin kita belajar dan bekerja lebih baik lagi,” ungkap Zhein.

Sebelum kejadian itu, Zhein mempersiapkan presentasi terkait tesis yang akan dibuat. Ia pun tidak tidur semalaman untuk membuat presentasi yang akan dipaparkan di hadapan *sensei* nya itu. Namun ketika ia menghadap, tiba-tiba *sensei* yang berbadan tinggi itu, marah karena menganggap tidak memahami intuisi dari isi tesisnya itu. Dari pengalaman unik tersebut membuat Zhein lebih berhati-hati menyampaikan satu ide dan harus dilihat apakah sesuai literatur atau tidak. “Tapi setelah saya lulus, dia bilang ke saya, kamu satu-satunya orang Indonesia yang tidak takut sama saya,” ujar Zhein sambil tertawa lagi.

Kejadian tersebut ternyata berdampak positif bagi Zhein, karena saat di wisuda, ia berhasil mendapatkan dua penghargaan yakni *outstanding thesis* dan *best presentation*. *Outstanding thesis* merupakan penghargaan bagi Zhein, karena tesisnya menjadi salah satu yang terbaik. Sedangkan *best presentation* merupakan penghargaan yang diberikan pihak universitas, karena presentasi Zhein merupakan yang terbaik.

Saat itu tesisnya diberi judul “Kondisi Geografi dan Pengembangan Pelabuhan” atau “*Geographic Conditions and Port Development*”. Zhein memilih tesis tersebut, karena berawal dari intuisi ekonomi yang diajarkan *senseinya*. Semula, ia memilih judul tesis terkait infrastruktur sektor PUPR yakni “Pengaruh Jalan Tol



Zhein bersama dosennya saat menerima dua penghargaan di Universitas Hiroshima

Terhadap Produktivitas Perusahaan”. Namun setelah didiskusikan dengan *sensei*, ia tidak bisa membuktikan hal itu. Sebab, untuk membuktikannya harus mempunyai *counter-faktual* atau kondisi suatu daerah yang tidak memiliki jalan tol dan dibahas juga mengenai pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Studi yang dilakukan di Jepang memberikan pelajaran berharga, karena ia diajarkan konsep kerja orang Jepang yakni Kaizen. Dengan konsep ini, mereka memperhatikan hal-hal kecil di pekerjaan mereka. Menurutnya konsep tersebut bisa diterapkan di BPIW, yang mana setiap staf melakukan hal-hal kecil dengan baik seperti mempersiapkan paparan yang bagus untuk pimpinan. “Dengan konsep Kaizen ini, kita lakukan *outcome* pribadi kita masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kantor kita,” tegas Zhein.

Dengan banyaknya pelajaran yang berharga tersebut, maka ia menyarankan generasi muda BPIW untuk melanjutkan pendidikan. “Universitas merupakan garis depan ilmu pengetahuan dan di sana kita mempelajari hal-hal yang baru dan dapat diterapkan di kantor. Jangan menggunakan ilmu yang 20 tahun yang lalu, saat pimpinan kita masih di bangku kuliah,” ucapnya sambil tertawa. **(Hen/infobpiw)**

Biodata Singkat

1. Nama Lengkap: Zhein Adhi Mahendra Setiawan S.E, M.Sc.
2. Tempat Lahir & Tanggal Lahir: Bandung, 26 Juli 1984
3. Pangkat dan Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I / III/b
4. Jabatan Saat Ini: Karya Siswa Sekretariat BPIW Kementerian PUPR

LOGO BPIW

Unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR memiliki identitas visual masing-masing yang menjadi ciri khas, Kepala BPIW menginisiasi pembuatan logo BPIW sebagai visualisasi dalam bentuk gambar atau sketsa yang mampu merepresentasikan BPIW. Metode sayembara dipilih sebagai alternatif dalam pencarian logo yang mampu mewakili Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah agar logo yang dihasilkan merupakan hasil karya partisipatif dari dan untuk BPIW. Pelaksanaan Sayembara Logo BPIW ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tentang Tim Penilai Sayembara Logo Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.



Gambar 1.1 Publikasi Sayembara Logo BPIW

Pembukaan pendaftaran Sayembara Logo BPIW Telah dilaksanakan selama satu pekan dari tanggal 1-7 November 2020 di lingkungan internal BPIW dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta terbuka untuk seluruh pegawai di lingkungan BPIW;
- Pemenang sayembara tidak otomatis menjadi logo BPIW, juri dan panitia berhak melakukan modifikasi dan finalisasi logo pemenang;
- Peserta mengirimkan desain logo dengan mengisi form di link Pendaftaran serta mencantumkan nama samaran.

Pada tanggal 7 November 2020 terdapat 17 finalis logo yang akan dinilai oleh Tim Penilai Sayembara Logo BPIW. Tahap penjurian dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020 melalui Rapat Penilaian Sayembara Logo BPIW yang akan menyeleksi 5 besar finalis dari 17 finalis yang telah berpartisipasi. Selanjutnya Tim Penilai Sayembara Logo BPIW menilai ke lima finalis logo dengan menggunakan rentang *score* 1-5. Setelah melalui rangkaian Sayembara Logo BPIW telah terpilih pemenang yang ditetapkan sebagai Logo BPIW setelah melalui proses modifikasi dan finalisasi desain.

A. Makna Logo

Logo secara keseluruhan menggambarkan peran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR dalam mewujudkan harmonisasi keterpaduan perencanaan dan pemrograman Infrastruktur PUPR dengan pendekatan pengembangan wilayah.

B. Konsep dan Arti Simbolis



1. Titik dan Segi Enam

Mengambil bentuk dasar segi enam, terinspirasi dari ilustrasi Teori lokasi Sentral (Walter Christaller, 1933) melambangkan konsep Pusat Pertumbuhan wilayah dan hubungan antara suatu tempat sentral dengan tempat sentral lain di sekitarnya.



2. Jaringan

Titik yang membentuk jaringan melambangkan keterpaduan antar lokasi strategis sebagai satu kesatuan dalam suatu pengembangan wilayah. Keterpaduan tersebut membentuk suatu harmoni yang seimbang layaknya harmonisasi perencanaan dan program di BPIW.



3. Integrasi sektor

Bentuk jaringan saling terintegrasi melambangkan Keterpaduan perencanaan pembangunan (*planning*) dan sinkronisasi program (*programming*) Infrastruktur PUPR dilambangkan oleh 4 Warna sektor, yaitu Sumber Daya Air (biru), Bina Marga (merah), Cipta Karya (kuning), dan Perumahan (hijau) yang mendukung dan menyeimbangkan pengembangan wilayah.



4. Bentuk

Penyederhanaan logo, tampak atas dapat dilihat sebagai simbolis 4 sektor di Kementerian PUPR yang saling bersatu bergandengan tangan untuk mewujudkan Infrastruktur PUPR yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

C. Warna

Sebagai identitas warna dasar digunakan warna gradasi (hijau dan biru) melambangkan pendekatan pembangunan *Green-Blue economy* yang mewakili aspek sustainability dalam pembangunan infrastruktur wilayah yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui dukungan infrastruktur wilayah yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. 4 Warna sektor dilambangkan melalui warna biru (Sumber Daya Air), merah (Bina Marga), kuning (Cipta Karya), dan hijau (Perumahan).



Gambar 1.2 Logo BPIW dan Ilustrasi pengaplikasian logo BPIW dalam berbagai desain



**Segenap Keluarga Besar BPIW Kementerian PUPR
Mengucapkan**

Selamat dan Sukses atas Dilantikannya

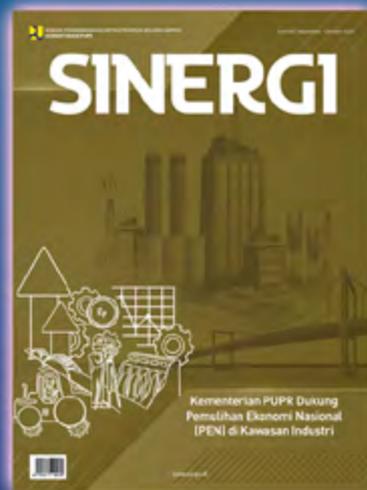
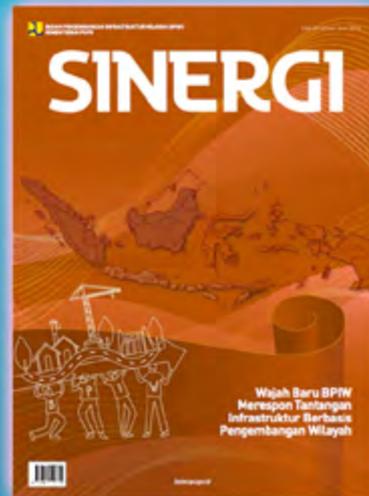
Bapak Benny Hermawan, S.T., M.Sc.

sebagai

**Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
BPIW Kementerian PUPR**



KALEIDOSKOP 2020



Sepanjang 2020, BPIW Kementerian PUPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana kegiatan yang telah dilakukan dimuat di buletin Sinergi yang setiap bulannya terbit (dengan tampilan cover yang tergambar di atas).

Selain di buletin, kegiatan BPIW juga dimuat di *website*. Dari sejumlah berita, kali ini tim redaksi Buletin Sinergi merangkum kegiatan-kegiatan penting BPIW di sepanjang tahun 2020. Berikut ulasannya pada Kaleidoskop 2020:

BPIW Matangkan Rencana Aksi NUDP 2020

BPIW Kementerian PUPR terus mematangkan rencana pelaksanaan dari *National Urban Development Project* (NUDP). NUDP sendiri merupakan program kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Hal itu terungkap dalam Rapat Pembahasan Paket Kegiatan NUDP di Kantor BPIW, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, M Rudy Siahaan saat membuka rapat mewakili Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, pada fase 2020 ini sudah ada enam kota peserta penerima NUDP, yaitu Kota Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Surakarta, Denpasar dan Metropolitan Bandung. "Fase 2020 ada agenda penyusunan analisa strategis sebagai masukan untuk dokumen rencana kota," ungkap Rudy. Menurutnya, NUDP sendiri ada enam tahapan.



Januari

BPIW Kementerian PUPR telah menyiapkan rencana aksi tahun 2020 hingga 2024 sebagai upaya dalam mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka rapat koordinasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Kantor BPIW, Senin, 17 Februari 2020.

Hadi mengatakan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat mematangkan rencana aksi lintas sektor dalam upaya mempercepat mengembangkan KSPN Borobudur.

Ia mengakui, pada rencana aksi 2020 hingga 2024 ada sejumlah kegiatan yang sangat strategis, yakni menghidupkan kembali *outstanding universal value* (OUV) atau nilai universal luar biasa Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Selain itu penanganan konektivitas dan penataan kawasan empat pintu masuk utama.



Kembangkan KSPN Borobudur, BPIW Siapkan Rencana Aksi 2020-2024

Februari

Kementerian PUPR mengusulkan segala perundang-undangan yang menaungi sektor infrastruktur PUPR masuk dalam pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Calon Ibukota Negara (IKN).

Usulan itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan sejumlah masukan saat rapat finalisasi Raperpres tentang Penetapan KSN Calon IKN yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

“Seperti Undang-undang Jalan, Undang-undang Rumah Susun dan lainnya,” terang Hadi.

UU Terkait PUPR Diusulkan Masuk Pertimbangan Raperpres

Guna menciptakan kesiapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran (TA) 2020, BPIW Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi Penajaman Program dan Kegiatan di Kantor BPIW, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, pembahasan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan 2020 perlu dilakukan untuk mendapat kesamaan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban BPIW pada tahun ini, serta terciptanya pola kerja yang efektif dan efisien.

“Misalnya dalam upaya pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, -red). Pada tahun 2020 ini sesuai arahan Presiden, BPIW akan memfokuskan penanganan terhadap lima KSPN super prioritas, seperti KSPN Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo dan Likupang,” terang Hadi saat membuka Rapat Penajaman Program dan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2020.



Program 2020 Terus Ditajamkan



BPIW Dukung Pengembangan Kawasan di Kaltara



Kementerian PUPR melalui BPIW akan fokus melakukan pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan program-program utama, seperti pembangunan jalan paralel perbatasan dan akses Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN, sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus perbatasan, dan pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Sungai Simantipal dan C500-C600 yang gelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkumham) di Jakarta, Kamis, (5/3).

Maret

Ir Hadi Sucahyono, MPP, PhD kembali diamanahi sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu terungkap setelah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melantik seluruh pejabat pimpinan tinggi madya/eselon I unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis, (5/3).

Pelantikan tersebut sebagai pengisian pejabat eselon I untuk susunan organisasi Kementerian PUPR yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR.

Adapun pelantikan pejabat dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52/TPA tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian PUPR.



Menteri PUPR Lantik Kepala BPIW

April

Guna membangun komunikasi internal dan kekompakan pegawai, BPIW Kementerian PUPR menggelar silaturahmi dan sambung rasa pimpinan dan staf di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu, (11/3).

Kepala BPIW Kementerian PPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan sambung rasa perlu dilakukan secara rutin agar dapat menguatkan kepedulian, kebersamaan, kekompakan, komunikasi yang harmonis antara pegawai.

Hadi berharap, ajang sambung rasa tersebut dapat dimanfaatkan jajaran staf untuk mengemukakan pendapatnya. "Kalau sehari-hari suasana canggung karena struktur jabatan, saat *coffee morning* kedudukannya semuanya sama dan harus lebih cair," terang Hadi.

BPIW Bangun Kekompakan Pimpinan dan Pegawai

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata yang berkembang, sehingga Danau Toba tepat ditetapkan sebagai super prioritas pengembangan destinasi wisata di tanah air.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi nara sumber seminar internasional "Pariwisata Berkelanjutan dan Kualitas Air Danau Toba" di Aula Kampus Institut Teknologi (IT) Del, Laguboti, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (13/3).

Hadi mengatakan, Danau Toba memiliki keindahan alam yang luar biasa, sehingga tren kunjungan wisatawan terus meningkat. Dengan begitu, terdapat potensi lebih efisien untuk dikembangkan. "Pengembangan Danau Toba itu memiliki potensi investasi yang lebih efisien, dengan pertumbuhan ekonominya bisa lebih cepat berkembang," ungkap Hadi.

BPIW Dukung Danau Toba Jadi KSPN Super Prioritas



BPIW Kaji Serang Raya

BPIW Kementerian PUPR telah melakukan kajian terkait usulan Serang Raya yang terdiri dari Kota Serang,

Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Menurut Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, hasil kajian menunjukkan bahwa Serang Raya memenuhi kriteria sesuai PP 15/2010 untuk layak menjadi Metropolitan.

“Kita memberikan masukan atau rekomendasi terkait usulan Gubernur Banten yang disampaikan ke Presiden yang diteruskan ke menteri-menteri termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Ternyata setelah kita cek enam kriteria, semuanya lulus, artinya layak untuk dijadikan Metropolitan Serang Raya” ujar Hadi, Jumat, 8 Mei 2020. (hen/infoBPIW)

Mei



Guna persiapan menjelang era *new normal* dan menanggulangi penularan Covid-19 di lingkungan kantor Kementerian PUPR, jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan kerja bakti, penataan, kebersihan ruangan dan lingkungan kerja, Jumat (29/5).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan serentak yang dilakukan jajaran BPIW ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR No. UM 0203-sj/416 tentang Kerja Bakti di Ruang Kerja Unit Organisasi Kementerian. Guna persiapan menjelang era *new normal* dan menanggulangi penularan Covid-19 di lingkungan kantor Kementerian PUPR, jajaran BPIW melakukan kerja bakti, penataan, kebersihan ruangan dan lingkungan kerja, Jumat (29/5). Ia berharap, saat berkerja dalam *new normal* nanti jajaran BPIW dapat selalu mentaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak fisik sosial, serta rajin cuci tangan. (ris/infoBPIW)



Pegawai BPIW Kerja Bakti di Lingkungan Kerja

Juni

Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di BPIW yang dilantik Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melakukan serah terima jabatan di kantor BPIW, Jakarta, Kamis (4/6). Serah terima dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris BPIW sebelumnya, Firman H. Napitupulu kepada Sekretaris BPW baru, Iwan Nurwanto yang disaksikan langsung kepala BPIW, Hadi Sucahyono.

Selanjutnya, Firman H. Napitupulu menjabat Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusat 1), Tris Raditian sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Pusat 2). Kuswardono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II (Pusat 3) dan Manggas Rudy Siahaan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III (Pusat 4). (ris/ infoBPIW)

Kepala BPIW Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional

Sebanyak empat pejabat pengawas (eselon IV) dan tiga pejabat fungsional ahli di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dilantik Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono di Jakarta, Rabu (1/7).

Empat pejabat pengawas (eselon IV) yang dilantik, yakni Heru Edhi Wibowo, SE, M.Eng. MURP sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Rima Lelowati, S.AP, M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Dra. Endah Trisuprasetyaning Widowati, sebagai Kepala Sub Bagian Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Shovich S. AP, MAP sebagai Kepala Sub Bagian Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Kemudian tiga pejabat fungsional yang dilantik adalah Dr. Dita S.N.A Diliani S.Sos, M.Si, Sinta Nur Aini, ST, MT dan Mutri Batulaini, S.Hum, M.T. (ris/ infoBPIW)

Kepala BPIW Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional



BPIW Percepat Pengembangan Metropolitan Kedungsepur

BPIW Kementerian PUPR komitmen melakukan percepatan pengembangan kawasan Metropolitan Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Ungaran Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kab. Grobogan). Demikian terungkap dalam rapat lanjutan "Penyiapan Rencana Pengembangan Metropolitan Kedungsepur" yang dibuka langsung Kepala BPIW, Hadi Sucahyono di Kantor BPIW, Jakarta, Kamis (16/7). Pelaksanaan rapat dilakukan secara virtual sesuai Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19.

Saat membuka rapat, Hadi menyampaikan, aksi pengembangan Metropolitan Kedungsepur diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat. "Harapannya agar saat pandemi Covid-19 ini terlewati, hasil pembangunannya dapat cepat membangkitkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan metropolitan sendiri," terang Hadi.



Juli

Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Industri, termasuk pada wilayah produksi sagu dalam rangka turut mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menjadi narasumber webinar "Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Industri Berbasis Sagu" yang digelar IPB, Selasa (28/7).

Menurut Hadi, dukungan infrastruktur yang dapat diwujudkan Kementerian PUPR pada kawasan produksi sagu, yakni mulai dari pembangunan jalan nasional dan jalan akses pelabuhan. "Selain itu, penyediaan air baku, perumahan, permukiman dan air bersih," terang Hadi.

Ia menerangkan, Indonesia memiliki lima provinsi yang menjadi sentra produksi sagu terbesar. "Kelima provinsi itu antara lain, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua Barat," papar Hadi.

BPIW Dukung Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Produksi Sagu

Agustus

Pada 2030 mendatang, “wajah” kota-kota di Indonesia akan memperhatikan beberapa aspek seperti keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono, kota-kota di Indonesia memperhatikan ketahanan terhadap bencana, kota cerdas, dan modern (sesuai dengan standar internasional).

Kota-Kota Tahun 2030 Inklusif dan Berkelanjutan

“Kota-kota di Indonesia harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, memiliki layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau, serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal,” ujar Hadi dalam Webinar yang digelar Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) yang bertajuk What Indonesian Cities Look Like In 2030?, Rabu, 29 Juli 2020.

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR di Pulau Papua, baik di Provinsi Papua Barat maupun Papua sudah sangat masif. Namun pembangunan di Papua tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM). Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo menegaskan Kementerian PUPR mendukung percepatan pembangunan di Papua termasuk SDM. Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi seluruh stakeholder di Jakarta, Senin, 3 Agustus.

Dengan koordinasi ini ia berharap Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dapat menjadi payung hukum untuk menjabarkan permasalahan yang ada di Papua. “Dengan Inpres itu diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat, agar masyarakat di sana dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” tuturnya.

Kementerian PUPR Dukung Percepatan Pembangunan di Papua



BPIW dan Badan Geologi Sepakat Pererat Kerja Sama

BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur memanfaatkan data dan informasi geologi. Dukungan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah.

Demikian diungkapkan Kepala BPIW kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat melakukan pertemuan dengan jajaran Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Bandung, Kamis, (3/9). Pertemuan tersebut dihadiri juga jajaran pejabat kedua lembaga.

Hadi Sucahyono mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur di kawasan strategis dipercepat dalam rangka pengembangan wilayah dan pemulihan ekonomi. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut, tentu perlu kajian mendalam termasuk diantaranya menganalisa daya dukung lingkungan.



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI mengenai pembahasan rencana kerja dan anggaran masing-masing Unit Eselon I Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Komisi V, Selasa, 8 September 2020. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae tersebut, dari Kementerian PUPR dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, Inspektur Jenderal PUPR Widiarto dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugiyartanto.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan setiap usulan Komisi V akan diakomodir dan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. "Tentunya kita tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita. Kita akan cek kondisi di lapangan seperti kondisi lahan dan kita rancang program yang akan kita laksanakan," tegasnya. (Hen)

BPIW Siap Menindaklanjuti Masukan DPR

September

Oktober

BPIW
Kementerian PUPR
memprediksi total penyerapan
keuangan Kementerian PUPR pada
2020 sebesar 97,58% dari keseluruhan pagu
Rp 85,70 Triliun. Adapun perkiraan sisa anggaran
yang tidak akan terserap terdiri dari belanja pegawai,
sisa loan, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan
Infrastruktur Wilayah I, BPIW Kementerian PUPR, Tris
Raditian saat mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR,
Hadi Suchayono memaparkan Realisasi Pelaksanaan
Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020 dalam Rapat
Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
yang digelar Bappenas di Bogor, Selasa (22/9).

Tris juga mengungkapkan, realisasi anggaran
Kementerian PUPR hingga 21 September
2020 mencapai 54,29% untuk progress
keuangan dan 54,42% untuk
progres fisik.

**Tahun 2020,
Penyerapan
Kementerian
PUPR Diprediksi
97,58%**

Kementerian PUPR
melalui BPIW berkomitmen
untuk meningkatkan produktivitas
wilayah dan perlindungan lingkungan hidup
melalui dukungan infrastruktur berkelanjutan.
Salah satunya perencanaan dan implementasi
infrastruktur hijau dengan kemitraan yang luas.

Kepala BPIW, Hadi Suchayono mengatakan, perencanaan
pengembangan infrastruktur hijau perlu disesuaikan
dengan kondisi alam, artinya keberadaan infrastruktur tidak
merusak ekosistem yang ada, melainkan mengakomodir
kepentingan habitat yang ada.

"Pembangunan infrastruktur tetap mendukung pelestarian,
konservasi, dan menjaga biodiversitas atau ekosistem
dari kondisi setempat," ujar Hadi dalam Rapat Kerja
Terbatas (Rakertas) Harmonisasi Rencana Tata
Ruang dengan Wilayah Kehutanan Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Nasional yang
dilakukan secara virtual di Jakarta,
(13/10).(BiI)

**BPIW
Dukung
Harmonisasi
Pembangunan
Infrastruktur
Hijau**



BPIW Dukung Pengembangan Sulsel

Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satunya berupa memberi dukungan pembangunan infrastruktur PUPR untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar-Kab. Maros-Kab. Gowa-Kab. Takalar).

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono pada sesi dialog "Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan" dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel di Makassar, Selasa 20 Oktober 2020. (ris)

November



BPIW Kementerian PUPR mendukung percepatan pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar-Kab. Maros-Kab. Gowa-Kab. Takalar). Hal itu terungkap dalam *Focus Group Discussion (FGD)* Rencana Pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata, Selasa 20 Oktober 2020.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, M. Rudy Siahaan menyampaikan, kegiatan FGD dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan Pemerintah Daerah, guna menjangkir banyak masukan dan informasi untuk pembangunan Metropolitan Mamminasata. (ris)



BPIW Dukung Pengembangan Mamminasata

Desember

Setelah sempat beberapa bulan kosong setelah ditinggal Firman H. Napitupulu yang sudah memasuki masa purna bakti, akhirnya jabatan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW ditempati oleh Benny Hermawan. Saat ini Benny yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, resmi menduduki jabatan barunya setelah dilantik Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Auditorium Kementerian PUPR, 22 Desember 2020 lalu.

**Benny Hermawan
Dilantik Menjadi
Kepala Pusat
Pengembangan
Infrastruktur
Wilayah Nasional**

Pelantikan dilakukan dalam rangkaian acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Administrator di seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Turut hadir dalam acara tersebut, seluruh pejabat eselon 1 termasuk Kepala BPIW Hadi Sucahyono



Perwakilan Milenial atau generasi muda BPIW melakukan ekskursi meninjau lapangan kondisi geologi lingkungan di Kawasan Lembang, Bandung, Sabtu 19 Desember 2020. Turut hadir Kepala BPIW, Hadi Sucahyono dan Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto.

Hadi mengatakan, kunjungan dilaksanakan guna memahami kondisi lapangan untuk pengembangan wilayah. "Perencanaan disusun di belakang meja, namun perlu terjun ke lapangan untuk mengetahui data dan informasi lapangan, dalam hal ini terkait sektor geologi," terangnya. (ris/infoBPIW)

**Terjun ke
Lapangan, Tim
BPIW Pelajari
Aspek Geologi**





BIDIK LENSA

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air. Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman.

TAMPUNGAN AIR

Salah satu upaya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah untuk mengantisipasi kekeringan dan mendukung program ketahanan pangan dan air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia salah satunya dengan membangun embung Embung Kamilin dan Gunung Raya yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Keberadaan embung ini untuk irigasi lahan pertanian dan sumber air baku bagi masyarakat.



KOLAM REGULASI

Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang berada di wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah selesai. Kolam tersebut dibangun untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Tallo bagian hilir. Wilayah Kota Makassar dan sekitarnya diharapkan dapat semakin berkembang karena sudah bebas banjir.





BENDUNGAN BARU

Pembangunan Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini telah rampung. Pembangunan bendungan ini diharapkan dapat mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal di sekitarnya.

JARINGAN IRIGASI FOOD ESTATE

Guna mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045 dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan pengembangan kawasan *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan kawasan ini di antaranya dilakukan dengan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan secara bertahap. Keberadaan kawasan *Food Estate* juga akan mendorong pengembangan wilayah di sekitarnya.

Menyusuri Keindahan BAHARI

Tanjung Kelayang



Keindahan alam di Belitung tidak akan ada habisnya. Bagaimana tidak? Selain pasir putihnya yang terkenal indah, hal lain yang akan kita jumpai di pantai-pantai Belitung adalah hamparan batuan granit raksasa yang sangat mempesona. Salah satunya Pantai Tanjung Kelayang. Tanjung Kelayang ini terletak di semenanjung sisi barat laut dari Pulau Belitung yang merupakan salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam hal ini Kementerian PUPR juga memberikan dukungan penuh dalam penataan Kawasan dan lingkungan yang dilakukan secara terpadu untuk menunjang pengembangan Kawasan Strategis Nasional termasuk pariwisata, lumpung pangan, industri, perdesaan dan perkotaan metropolitan. Berbagai destinasi menarik dapat dikunjungi diantaranya, Pulau Lengkuas, Pulau Garuda, Pulau Pasir, dll. berikut panduan biaya untuk transportasi, akomodasi, paket destinasi dan juga info kuliner di Tanjung Kelayang:



TRANSPORTASI

Menggunakan Pesawat

Jakarta - Tanjung Pandan

(Maskapai: *Citilink/Garuda Indonesia/Lion Air/Nam Air/Sriwijaya*)

1 Jam

Bandara H.A.S Hanandjoeddin - Tanjung Kelayang

± 30-45 menit (menggunakan mobil pribadi)

Sewa Kendaraan



Rp 70k-100k per-hari



Rp 400k-500k per-hari

HOTEL



AKOMODASI

- ★★★★ Bahamas Hotel and Resort
- ★★★★★ Hotel Santika Premier
- ★★★★★ Sheraton Belitung Resort

Ketiga hotel ini letaknya sangat strategis, hanya butuh waktu 15-20 menit untuk menuju pantai Tanjung Kelayang.



AKTIVITAS WISATA

Pantai Tanjung Kelayang ini tepatnya terletak di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk. Pantai ini membentang sepanjang 4 km dengan hamparan pasir putih dan batu granit besar khas Belitung. Aktifitas yang bisa nikmati diantaranya: **Berenang, Diving, Snorkeling, Hunting Foto, Island Hopping** dan juga menikmati sunset.



Di **Island hopping** ini kita bisa menjelajah pulau-pulau kecil, seperti **Pulau Lengkuas, Pulau Batu Berlayar, Pulau Pador** dan masih banyak lagi.



KULINER

Di sekitar Pantai Tanjung Kelayang ini terdapat berbagai rumah makan dengan makanan khas yakni **Seafood**

Terdapat makanan khas Belitung seperti **Gangan, Mie Belitung, Nasi Tim Ayam Belitung**, dll



TIPS MENUJU TANJUNG KELAYANG

- Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan membawa **hand sanitizer**, serta menjaga jarak
- Membawa **kacamata hitam**
- Membawa **makanan dan minuman**
- Baiknya membawa sendiri peralatan snorkeling



SURAT PEMBACA

Surat Pembaca_1



Diskon Tarif Tol Untuk Pengusaha Kecil

Di masa pandemi ini saya sering mengambil dagangan di Jakarta dan sering menggunakan kendaraan pribadi. Di tengah masa sulit ini, saya harap Kementerian PUPR bisa memberikan diskon tol. Agar kami, para pengusaha kecil masih bisa bertahan. Jaya Terus Kementerian PUPR!. Pantang menyerah membangun negeri.

Subroto
Surakarta

Surat Pembaca_2



Berharap Tahun Depan Jalan Tol Joglo- Semar Segera diselesaikan

Semoga tahun depan Jalan Tol Joglo- Semar bisa segera diselesaikan, karena jalan Solo-Jogya sering sekali macet. Hal ini membuat waktu tempuh kendaraan, molor dari sebelumnya.

Vania
Yogyakarta

*Segenap Pimpinan dan Pegawai
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mengucapkan:*

Selamat Tahun Baru 2021





— PUTUS

PENYEBARAN COVID-19



1
Bekerja dari Rumah
(Work From Home)



2
Belajar dari Rumah
(Study From Home)



3
Ibadah dari Rumah
(Worship From Home)



4
Tingkatkan Imunitas
Tubuh



5
Rajin Cuci Tangan



6
Hindari Menyentuh
Bagian Wajah secara
Langsung



7
Memakai Masker



8
Hindari Interaksi
Langsung



9
Disiplin Menjaga Jarak
(Physical Distancing)



BPIW

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT